



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA DPAKOI 2024

**DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL**



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT PERUNDINGAN
ANTAR KAWASAN DAN
ORGANISASI INTERNASIONAL**

TAHUN 2024

KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI
2025

LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) yang menguraikan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi serta sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis DJPPI Tahun 2020-2024, Rencana Kerja DPAKOI Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja DPAKOI Tahun 2024..

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang saat ini dalam proses revisi.

Besar harapan kami, Lapkin DPAKOI Tahun 2024 ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja kami di lingkungan Ditjen PPI dan menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kinerja DPAKOI di masa mendatang.

Jakarta, 14 Maret 2025
Direktur Perundingan Antar Kawasan
dan Organisasi Internasional,



Natan Kambuno

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) merupakan unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional di bawah Kementerian Perdagangan RI. Peran yang diemban Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional memiliki peran signifikan dalam upaya peningkatan akses pasar barang di forum Organisasi Internasional. Diplomasi perdagangan tersebut dilakukan dengan tujuan agar kinerja perdagangan berdampak dan bermanfaat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Ditjen PPI dalam Perjanjian Kinerja (Lampiran 1) telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni (i) Meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional; dan (ii) Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia; dengan menetapkan 3 (Tiga) Indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Secara umum, capaian sasaran program Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja DPAKOI Tahun 2024 disusun untuk melaporkan hasil pemantauan kinerja secara periodik, sehingga tercapai keselarasan antara pelaksanaan program dan pencapaian target dengan Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Kerja DPAKOI Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PERKIN) 2024. Pada Tahun Anggaran 2024, DPAKOI memperjanjikan dua sasaran kegiatan dan tiga indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja DPAKOI Tahun 2024

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1.	Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional					
	1	Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	Kegiatan	6	6	100

2.	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia					
	2	Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/state ment di tingkat regional dan internasional	Persen	80	95	118.75
3.	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional					
	3	Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	Persen	85	89.75	105.6
Rata-rata Capaian Tahun 2024						104,7

Sumber: DPAKOI, 2025

Secara umum, tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Tahun 2024 telah mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tiga indikator kinerja yang telah ditetapkan memiliki capaian 104,7 persen.

Penjelasan detail mengenai realisasi anggaran dan realisasi kinerja Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi internasional dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Terdapat dua sasaran kegiatan (Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional dan Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia) sebagai indikator pencapaian tujuan DPAKOI. Dari dua sasaran tersebut terdapat tiga indikator kinerja kegiatan.

Tabel 2. Realisasi Capaian Anggaran DPAKOI Tahun 2024

Tahun Pagu Anggaran (sebelum pagu revisi)	Pagu Anggaran Setelah Pemotongan	Realisasi Anggaran	Realisasi
Rp 6.000.000.000	Rp 5.460.000.000	Rp 5,458,256,634	99,97%

Sumber: DPAKOI (2025)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN	
EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
STRUKTUR ORGANISASI	2
PERAN STRATEGIS ORGANISASI	4
ISU STRATEGIS	12
PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
RENCANA STRATEGIS	18
PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
SASARAN PROGRAM 1: IK-1	23
KEGIATAN ANTAR KAWASAN DAN OI	24
SASARAN PROGRAM 2: IK-2	57
SASARAN PROGRAM 3: IK-3	65
KINERJA ANGGARAN	73
BAB IV PENUTUP	75
KESIMPULAN	75
REKOMENDASI	75
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen DPAKOI Tahun 2024	iii
Tabel 2. Realisasi Capaian Anggaran DPAKOI Tahun 2024	v
Tabel 3. Jumlah dan Kualifikasi SDM DPAKOI Tahun 2024	3
Tabel 4. Indikator dan Target Kerja 2020-2024 atas Renstra DJPPPI	19
Tabel 5. Perjanjian Kinerja DPAKOI Tahun 2024	20
Tabel 6. Capaian Kinerja Organisasi DPAKOI Tahun 2024	22
Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	23
Tabel 8. Rincian Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	24
Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2	58
Tabel 10. Keberterimaan Usulan Indonesia pada Joint Ministerial Statement – Joint Meeting of Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade 2024	60
Tabel 11. Masukan Indonesia yang Tidak Diakomodir	61
Tabel 12. Keberterimaan Usulan Indonesia pada forum G20 Brasil 2024	63
Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3	65
Tabel 14. Realisasi Kinerja Anggaran DPAKOI 2024	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi DPAKOI Tahun 2024	4
Gambar 2. Partisipasi Delegasi RI pada Pertemuan APEC CTI 1 2024	25
Gambar 3. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Memimpin Delegasi RI pada Pertemuan APEC CTI 2 2024	26
Gambar 4. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Mendampingi Menteri Perdagangan RI pada Pertemuan APEC Minister Responsible for Trade Meeting (MRT) 2024	27
Gambar 5. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional mewakili Menteri Perdagangan RI pada Pertemuan Joint Meeting of Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade	28
Gambar 6. Perwakilan Delegasi RI berpartisipasi pada Third APEC Committee on Trade and Investment (CTI 3) Meeting	29
Gambar 7. Menteri Perdagangan RI didampingi oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada rangkaian Pertemuan APEC Economic Leaders Week (AELW) 2024	30
Gambar 8. Presiden membuka acara dan menyampaikan sambutan pada Konferensi dan Pameran COCOTECH ke-51 di Surabaya	33
Gambar 9. Pertemuan ICC COGENT Steering Committee di Surabaya	34
Gambar 10. World Coconut Day 2024 di Port Moresby, Papua Nugini	35
Gambar 11. Sesi Tahunan ke-60/Pertemuan Tingkat Menteri ICC di Kolombo, Sri Lanka	36
Gambar 12. Pertemuan ke-13 Komite Research & Development (R&D) IPC di Kochi, India	37
Gambar 13. Pertemuan ke-10 Komite Pemasaran IPC di Bandung	38
Gambar 14. Pertemuan ke-10 Komite Mutu IPC di Putrajaya, Malaysia	39
Gambar 15. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Menghadiri Pertemuan Eksekutif Heads of Delegations (HoD) ke-52 di Kolombo, Sri Lanka	40
Gambar 16. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Memimpin Delegasi RI pada Pertemuan G20 TIWG Brazil 2024	47
Gambar 17. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Mewakili Menteri Perdagangan pada Pertemuan G20 Trade dan Investment Ministers Meeting Brazil 2024	47
Gambar 18. Menteri Perdagangan RI Didampingi Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Menghadiri Outreach Session G7 Trade Ministers Meeting 2024	49
Gambar 19. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Kickoff Meeting Komite Bidang Trade Committee and the Working Party on Export Credits OECD, 9 September 2024	66
Gambar 20. Focus Group Discussion (FGD) Ad-Interim Komite Bidang Perdagangan OECD, 7 November 2024	68

Gambar 21. Focus Group Discussion (FGD) Komite Bidang Perdagangan OECD, 29 November 2024	69
Gambar 22. Forum Diskusi “Kesiapan Perdagangan Nirkertas di Asia dan Pasifik dalam kerangka UNESCAP	71
Gambar 23. Fokus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Sistem Preferensi Perdagangan Antar Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (TPS-OIC) dalam rangka Peningkatan Kinerja Perdagangan Indonesia	72

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “*Good Governance*” yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) Tahun 2024 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan DPAKOI kepada semua pihak yang berkepentingan. Sumber daya tersebut meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas-tugas pokok DPAKOI yang harus dipertanggungjawabkan kepada Ditjen PPI dan *stakeholders* lainnya.

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 yang saat ini dalam proses revisi dan untuk rancangan yang baru masih belum disahkan. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 mengamanatkan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat Unit Kerja Eselon II. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat merupakan media pertanggungjawaban DPAKOI dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Kementerian dalam satu tahun anggaran. Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Ditjen PPI telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis DPAKOI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Dokumen

Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.

Ditjen PPI selaku salah satu unit di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan perundingan-perundingan perdagangan di berbagai forum internasional, telah menyampaikan dokumen pelaporan secara berkala (triwulan) kepada Menteri Perdagangan. Selanjutnya, pada Triwulan keempat disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAPKIN) Ditjen PPI Tahun Anggaran 2024.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Direktorat Perundingan Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 164, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan antar kawasan, organisasi internasional komoditas, dan organisasi internasional;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan antar kawasan, organisasi internasional komoditas, dan organisasi internasional;
- penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan antar kawasan, organisasi internasional komoditas, dan organisasi internasional; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2.1 Kelompok Jabatan Fungsional pada Kerja Sama Forum APEC
 - 2.2 Kelompok Jabatan Fungsional pada Kerja Sama Forum Organisasi Komoditi
 - 2.3 Kelompok Jabatan Fungsional pada Kerja Sama Forum G20
 - 2.4 Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi OKI dan D8
 - 2.5 Kelompok Jabatan Fungsional pada Kerja Sama Forum OECD
 - 2.6 Kelompok Jabatan Fungsional pada Kerja Sama Forum PBB

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari :

- i. Direktur : 1 orang
- ii. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang
- iii. Negosiator Ahli Madya : 5 orang
- iv. Negosiator Ahli Muda : 9 orang

- v. Negosiator Ahli Pertama : 11 orang
- vi. Analis Perdagangan Ahli Muda : 1 orang
- vii. Analis Perdagangan Ahli Pertama : 1 orang
- viii. Analis Data dan Informasi : 3 orang
- ix. Verifikator Keuangan : 1 orang
- x. Honorer : 6 orang

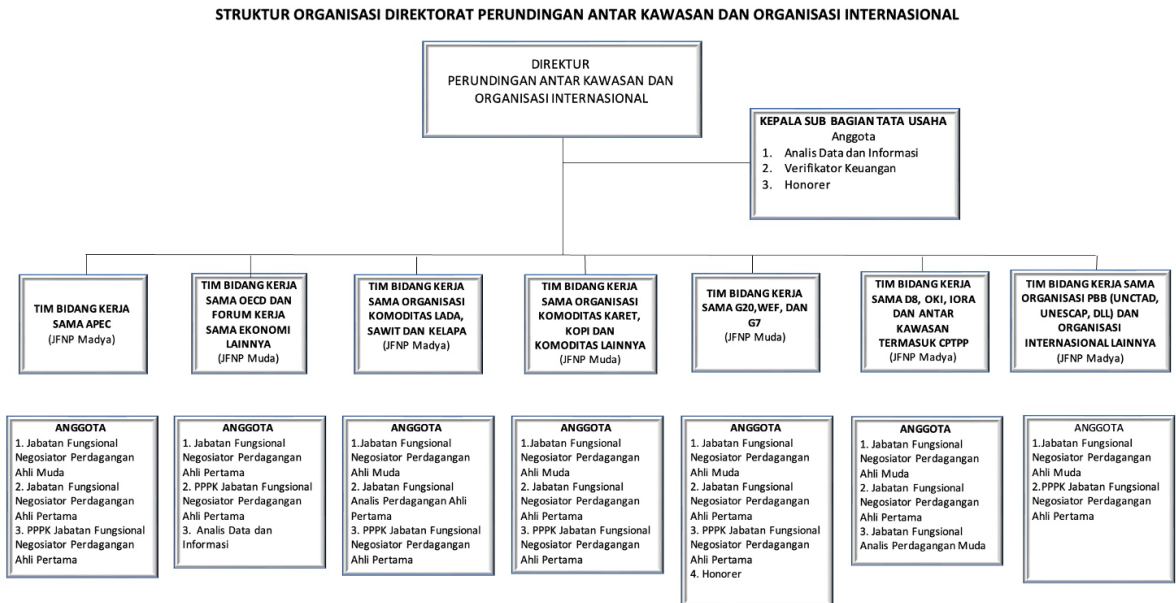
Jumlah : 39 orang

Tabel. 3 Jumlah dan Kualifikasi SDM

No.	Pendidikan	Jumlah PNS & CPNS				Jumlah
		Honorer	Go. II	Gol. III	Go. IV	
1	SLTA	3	-	-	-	3
2	D3	-	1	-	-	1
3	S1	3	-	13	-	16
4	S2	-	-	12	7	19
5	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		6	1	25	7	39

Sumber: DPAKOI (2025)

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL, DITJEN PPI



Sumber: DPAKOI (2025)

PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Peran Strategis Kerja Sama di Forum APEC

Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) merupakan instansi penjuror nasional di perundingan Komite Perdagangan dan Investasi (*Committee on Trade and Investment/CTI*) APEC yang juga mengkoordinasikan *sub-fora* di bawah CTI. Forum-forum di bawah CTI tersebut membahas permasalahan, tantangan, dan inisiatif lebih teknis sesuai dengan fokus masing-masing kelompok kerja yaitu terkait perdagangan jasa (Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Kemendag); standar (Badan Standarisasi Nasional), akses pasar (DPAKOI, Kemendag); investasi (BKPM), dialog industri otomotif dan kimia (Kemenperin).

Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam diplomasi ekonomi di forum APEC melalui kontribusi pada inisiatif yang diusulkan oleh Ekonomi anggota APEC lainnya yang akan membawa manfaat untuk perdagangan dan investasi serta perekonomian di Indonesia seperti peningkatan akses pasar untuk produk-produk unggulan domestik yang didorong untuk memiliki daya saing di pasar luar negeri dan berupaya untuk membuka akses investasi melalui forum tersebut. Indonesia juga aktif dalam menyusun dan mengusulkan inisiatif-inisiatif melalui kerja sama ekonomi dan teknik terkait peningkatan akses pasar untuk produk-produk unggulan domestik dan didorong memiliki daya saing di pasar luar negeri yang

berhasil disepakati dan mendapat pembiayaan dari APEC yang berguna dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya domestik pada khususnya dan Ekonomi anggota APEC pada umumnya.

Partisipasi Indonesia antara lain dengan aktif mengusulkan inisiatif dan memberikan kontribusi melalui tanggapan/masukan/dukungan atas inisiatif-inisiatif yang diajukan oleh Ekonomi anggota APEC lainnya. Inisiatif Indonesia dalam program pengembangan kapasitas yang berhasil mendapatkan pendanaan dari APEC senilai USD 1,351,626 yaitu berupa 11 (sebelas) proyek melalui seleksi ketat terhadap proposal awal (*Concept Note*) diajukan di APEC

Pada tahun 2024, Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah melakukan implementasi inisiatif "*Study on Strategy to Promote the Utilisation of the APEC Trade Repository*" di forum Market Access Group (MAG) dan menjadi *co-sponsor* beberapa inisiatif Ekonomi anggota APEC antara lain "*APEC Workshop on Promoting One Village One Product (OVOP) through E-commerce*" dan "*Promote Green Garment and Textile Sector towards Inclusive and Sustainable Growth*" usulan Vietnam.

Dalam mengupayakan agar Indonesia mendapatkan manfaat maksimal dari kerja sama fasilitasi perdagangan dan investasi APEC, DPAKOI melakukan pembahasan inisiatif lebih teknis dilakukan di sub-fora di bawah CTI dengan fokus masing-masing kelompok kerja yaitu terkait prosedur dan fasilitasi Kepabeanan (Ditjen. Bea dan Cukai, Kemenkeu); mobilitas pelaku usaha (Ditjen. Imigrasi, Kemenkumham); Kekayaan Intelektual (DJKI, Kemenkumham); dan Ekonomi Digital (Kominfo dan Kemlu).

Peran Strategis Kerja Sama OECD dan Forum Kerja Sama Ekonomi Lainnya

Salah satu inisiatif strategis yang menjadi fokus dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui proses akses keanggotaan ke Organisation for Economic Co-operation and Development/Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Bergabungnya Indonesia dalam OECD menjadi salah satu upaya dalam mendorong transformasi domestik dan institusi nasional dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

OECD merupakan organisasi kerja sama internasional yang mayoritas anggotanya adalah negara-negara berpendapatan tinggi. Didirikan pada tahun 1961, OECD saat ini beranggotakan 38 negara dan lima mitra utama (Indonesia, Afrika Selatan, Brazil, India, dan Tiongkok). Berdasarkan data Trade Map 2023 (diolah DPAKOI), OECD dan mitra utamanya menguasai pangsa perdagangan sebesar 75,72% atau lebih dari 3/4 perdagangan dunia. Manfaat di bidang perdagangan yang diharapkan dari keanggotaan Indonesia pada OECD ini yaitu: peningkatan perdagangan sebagai dampak penurunan hambatan non-tarif pada negara-negara OECD dan meningkatnya fasilitasi perdagangan. Berdasarkan hasil penelitian Badan Kebijakan Perdagangan yang dirilis pada tahun 2024, keanggotaan Indonesia berpotensi meningkatkan ekspor produk ke negara-

negara OECD, antara lain peningkatan sebesar USD 108,9 miliar/73,87% untuk produk tekstil dan peningkatan sebesar USD 571 miliar/33,3% untuk produk kayu.

Untuk bergabung dengan OECD, negara kandidat harus memenuhi berbagai kriteria yang terdapat dalam *Framework for the Consideration of Prospective Members*. Proses aksesi mencakup 3 (tiga) tahap utama: pra-aksesi, aksesi, dan pasca-aksesi, yang memerlukan penyesuaian kebijakan domestik terhadap standar dan instrumen OECD, baik yang bersifat mengikat (*legally binding*) maupun tidak mengikat (*non-legally binding*).

Indonesia telah menjalin kemitraan dengan OECD sejak tahun 2007 dengan menjadi salah satu mitra utama yang ditindaklanjuti dengan kerja sama Joint Work Programme (JWP). Pada tanggal 13 Juli 2023, Indonesia menyetujui aksesi penuh ke OECD, yang diikuti dengan pertemuan Presiden RI dan Sekjen OECD pada Agustus 2023. Pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD tanggal 2-3 Mei 2024, Menko Perekonomian secara resmi menerima *OECD Accession Roadmap for Indonesia*. Pemerintah Indonesia menargetkan aksesi penuh ke OECD selesai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, atau pada tahun 2027. Untuk mendukung proses ini, Presiden RI telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 17 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD, yang diikuti dengan Keputusan Menko Perekonomian No. 232/2024 yang mengatur tugas penanggung jawab bidang dan sekretariat Tim Nasional OECD.

Dalam proses aksesi OECD, keterlibatan Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dengan Menteri Perdagangan sebagai Penanggung Jawab pada 4 (empat) Komite Bidang OECD, yaitu:

- 1) *Trade Committee and the Working Party on Export Credits (Trade Committee)*;
- 2) *Competition Committee*;
- 3) *Committee on Consumer Policy*; dan
- 4) *Investment Committee and the Working Party on Responsible Business Conduct (Investment Committee)*

Dari keempat komite tersebut, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional merupakan koordinator bidang Trade Committee/Komite Bidang Perdagangan dengan 3 (tiga) *responsible committee*/cakupan kerja, yang meliputi:

- 1) *Trade Committee*;
- 2) *Working Party on Export Credits and Credit Guarantees*; dan
- 3) *Committee on SMEs and Entrepreneurship*

Dalam peran ini, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional bertanggung jawab untuk mengoordinasi penyelesaian dokumen yang berisi hasil identifikasi penyesuaian regulasi nasional dengan instrumen-instrumen OECD pada komite-komite dimaksud. Berdasarkan *Accession Roadmap*, terdapat beberapa prinsip utama yang dinilai pada *technical accession review* Trade Committee and Working Party on Export Credits, yaitu:

- 1) Komitmen Indonesia terhadap transparansi dan keterbukaan dalam penyusunan kebijakan perdagangan;
- 2) Komitmen Indonesia terhadap keterbukaan akses pasar produk pertanian dan non-pertanian serta jasa;
- 3) Komitmen terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual;
- 4) Komitmen terhadap standar OECD terkait kredit ekspor; dan
- 5) Komitmen Indonesia terhadap reformasi WTO.

Pada tahun 2024, Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, telah melakukan penilaian mandiri identifikasi keselarasan peraturan/kebijakan/praktik Indonesia dengan OECD dan penyelesaian dokumen Initial Memorandum (IM), pada instrumen terkait Komite Bidang Perdagangan. Setelah dokumen IM diterima oleh Sekretariat OECD, tahap selanjutnya adalah reviu teknis, yang akan melibatkan evaluasi oleh Sekretariat OECD terhadap hasil penilaian mandiri Indonesia dan akan menjadi dasar untuk tahapan selanjutnya dalam proses akses.

Pelaksanaan reviu akses Indonesia ke OECD akan diintensifkan setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD menyerahkan seluruh dokumen IM yang diwajibkan bagi Indonesia kepada OECD. Proses reviu teknis akan mencakup peninjauan dokumen IM *per-section* oleh Sekretariat OECD, penyeragaman format IM oleh semua komite bidang terkait, pelaksanaan reviu teknis oleh Sekretariat dan Direktorat Substantif OECD (melalui pengisian kuesioner, pelaksanaan *fact finding mission*), dan pelaksanaan reviu teknis oleh negara anggota pada setiap Komite Bidang.

Peran strategis Kerja Sama di Forum Organisasi Komoditi Internasional

Keberhasilan Indonesia untuk meningkatkan ekspor, khususnya ekspor komoditas utama perkebunan seperti sawit, karet, kopi, kelapa, dan lada, bergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia saat ini, kemantapan sistem perdagangan internasional, dan kemampuan ekonomi nasional dalam beradaptasi terhadap perkembangan perekonomian internasional. Di sisi lain, tantangan dalam peningkatan ekspor komoditas Indonesia adalah masih rendahnya posisi tawar negara produsen, menjaga stabilitas harga komoditas internasional di level yang menguntungkan bagi petani dan berbagai hambatan dan diskriminasi perdagangan oleh negara konsumen termasuk penerapan sertifikasi dan standar *sustainability* komoditas.

Untuk mendukung peningkatan akses pasar dan melindungi komoditas ekspor, Indonesia tergabung dalam organisasi komoditas internasional sebagai salah satu strategi kebijakan perdagangan. Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen PPI merupakan *focal point* atau instansi penjurur pada perundingan isu perdagangan di Forum Organisasi Komoditas, yaitu: International Tripartite Rubber Council

(ITRC), Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), International Coffee Organization (ICO), International Coconut Community (ICC), dan International Pepper Community (IPC). Melalui keanggotaan dan partisipasi aktif pada OI Komoditas, Indonesia memperjuangkan isu-isu yang menjadi kepentingan nasional, antara lain: penguatan posisi tawar antar negara produsen; menjaga stabilitas harga di tingkat yang remunerative bagi petani; mengatasi hambatan dan diskriminasi perdagangan termasuk mendorong penyusunan standar *sustainability* sesuai standar negara produsen. Perundingan yang dilaksanakan di fora OI Komoditas perundingan multilateral/plurilateral bersifat strategis karena menitikberatkan pada dukungan politis dan komitmen negara anggotanya melalui kesepakatan pemimpin atau pejabat negara. Langkah ini sering kali diperlukan untuk mengatasi hal-hal kritis yang menjadi masalah bagi ekonomi dan perdagangan dunia secara cepat.

Peran strategis Kerja Sama di Forum G20

G20 merupakan forum kerja sama ekonomi internasional terkemuka yang terdiri dari 20 anggota (19 negara dan Uni Eropa) dengan *Gross Domestic Product* (GDP) terbesar untuk mencari cara menghadapi berbagai tantangan utama ekonomi dunia, melalui dialog dan kebijakan politik para pemimpinnya. G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili 85 persen GDP dunia, 75 persen perdagangan global, dan dua-per-tiga penduduk dunia bermukim di negara-negara G20. Dengan kekuatan dan indikator-indikator ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara anggota, G20 memiliki modalitas yang kuat sebagai *main driver* kerja sama ekonomi dunia serta pengaruh yang besar bagi pengelolaan perekonomian global dan sistem finansial. Anggota G20 terdiri dari Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.

Keanggotaan pada G20 telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci pada perekonomian global. G20 merupakan sarana strategis untuk dapat mengekstrapolasikan kepentingan nasional Indonesia ke level global. Sebagai satu-satunya negara ASEAN yang juga menjadi anggota G20, keanggotaan di G20 juga berperan penting dalam memperkuat posisi kepemimpinan Indonesia di ASEAN karena dapat menjadi jembatan suara kolektif negara-negara ASEAN untuk G20.

Pembahasan sektor perdagangan di G20 dilakukan melalui *G20 Trade and Investment Working Group* (TIWG). Perundingan G20 TIWG telah dilaksanakan oleh Presidensi RRT (2016), Presidensi Jerman (2017), Presidensi Argentina (2018), Presidensi Jepang (2019), Presidensi Arab Saudi (2020), Presidensi Italia (2021), Presidensi Indonesia (2022), Presidensi India (2023), dan Presidensi Brazil (2024).

Kementerian Perdagangan sebagai instansi penjurur (*focal point*) Indonesia untuk G20 TIWG perlu terus berperan aktif dalam perundingan di sektor perdagangan

dengan negara anggota G20, guna memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional Indonesia dan negara berkembang, serta menciptakan koherensi di tingkat multilateral/ plurilateral.

Peran Strategis Kerja Sama di Forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Developing Eight (D-8), IORA, dan CPTPP

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) didirikan di Rabat, Maroko, pada tanggal 25 September 1969. Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi, dan Maroko, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam yang pertama tanggal 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko. Seiring perkembangannya OKI berubah nama pada tanggal 28 Juni 2011 dari Organisasi Konferensi Islam menjadi Organisasi Kerja Sama Islam.

Pada 13th Session of the Islamic Summit Conference tanggal 10-15 April 2016 di Istanbul, Turki, negara anggota menyepakati Target OIC-2025: *Program of Action*, yang menetapkan target pertumbuhan perdagangan intra OKI hingga 25% pada 2025. Namun demikian, tantangan terbesar bagi OKI di bidang ekonomi dan perdagangan adalah masih rendahnya GDP sebagian besar negara anggota OKI dan tingginya kesenjangan ekonomi di antara negara anggota OKI.

Kerja sama perdagangan intra OKI diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi kendala dan ketimpangan ekonomi di antara negara-negara anggota. Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara anggota, OKI mendirikan komisi khusus dalam struktur organisasinya, yaitu *The Standing Committee for Economic and Trade Cooperation (COMCEC)*. COMCEC telah menetapkan *COMCEC Strategy* yang terdiri dari dua instrumen penting, yaitu *COMCEC Working Group Meeting* dan *COMCEC Project Funding*. Kementerian Perdagangan merupakan instansi penjurur (*focal point*) Indonesia untuk *COMCEC Trade Working Group* terus aktif terlibat dalam implementasi program kerja sama peningkatan perdagangan dengan negara anggota OKI, termasuk melalui pemanfaatan *COMCEC Project Funding*.

Developing Eight (D-8) didirikan melalui Deklarasi Istanbul yang disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-1 D-8 pada tanggal 15 Juni 1997 di Istanbul, Turki. Pada KTT ke-5 D-8 tahun 2006 di Bali, para pemimpin negara D-8 menandatangani dua perjanjian perdagangan di antara negara anggota, yaitu D-8 Preferential Trade Agreement (PTA) dan Multilateral Agreement among D-8 Member Countries on Administrative Assistance in Customs Matters (AACM).

Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan sekitar USD 4.8 triliun dan jumlah penduduk sekitar 1,15 miliar pada tahun 2020, D-8 merupakan salah satu *economic grouping* negara berkembang yang potensial. Berdasarkan prediksi *Price Waterhouse Coopers*, seluruh negara anggota D-8 akan berada dalam 25 negara dengan perekonomian terbesar pada 2050 sehingga D-8 dapat menjadi forum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. D8 juga

dapat menjadi platform bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi ekonomi di tingkat regional dan internasional serta mempromosikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut.

Indian Ocean Rim Association (IORA) adalah organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama regional dan pembangunan berkelanjutan antar negara-negara di kawasan Samudra Hindia. IORA beranggotakan 23 negara dan 12 mitra dialog. IORA memiliki 3 (tiga) *working group* yang bersifat permanen, yaitu (1) *Indian Ocean Rim Academic Group* (IORAG): mewakili kelompok akademisi; (2) *Indian Ocean Rim Business Forum* (IORBF): mewakili kelompok pelaku usaha (KADIN); dan (3) *Working Group on Trade and Investment* (WGTI): mewakili kelompok pemerintah.

Kementerian Perdagangan (c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Ol, Ditjen PPI), bersama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi instansi pengampu untuk *Working Group on Trade and Investment* (WGTI). WGTI membahas enam (6) bidang prioritas, yaitu (1) *Maritime safety and security*; (2) *Trade and Investment Facilitation*; (3) *Fisheries management*; (4) *Disaster preparedness*; (5) *Academic, science and technology cooperation*; dan (6) *Tourism and cultural exchange*.

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) merupakan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang komprehensif dan progresif antara 12 negara anggota di kawasan Indo-Pasifik. Setelah Amerika Serikat keluar dari TPP tahun 2017, 11 negara melakukan negosiasi ulang dan menghasilkan CPTPP yang ditandatangani pada 8 Maret 2018, dan mulai berjalan pada 30 Desember 2018. Inggris resmi bergabung menjadi anggota ke-12 CPTPP sejak 15 Desember 2024.

CPTPP mempertahankan perjanjian perdagangan bebas dengan level ambisius dan berstandar tinggi TPP yang mencakup komitmen pada beberapa aspek seperti perdagangan barang, investasi, perdagangan jasa dan mobilitas tenaga kerja, pengadaan pemerintah, fasilitasi perdagangan dan bea cukai, ketentuan asal barang, BUMN, serta HAKI.

PDB CPTPP (2023) sekitar USD 19 triliun atau mencakup 10,3% dari PDB global, populasi 518,4 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari populasi global, dan total perdagangan mencapai USD 7,1 triliun atau mencakup 15% dari perdagangan global. Ketua Komisi CPTPP tahun 2024 dipegang oleh Kanada, kemudian digantikan oleh Australia sebagai Ketua Komisi CPTPP untuk periode 2025.

Indonesia telah menyampaikan usulan akses CPTPP melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Perdagangan Selandia Baru, selaku *depository country* CPTPP, pada tanggal 19 September 2024. Selandia Baru menyampaikan jawaban resmi pada tanggal 20 September 2024 dan telah mensirkulasikan permintaan akses Indonesia kepada anggota CPTPP.

Menko Perekonomian juga telah bertemu dengan 12 Dubes negara anggota CPTPP di Jakarta pada tanggal 25 September 2024. Para Dubes secara umum menyambut baik rencana akses Indonesia. Selain itu, lebih dari 6 (enam) negara

anggota CPTPP mendukung rencana akses Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kanada selaku *Chair Commission CPTPP* 2024 dalam pertemuan 30 Desember 2024. Saat ini Indonesia dalam proses koordinasi penyiapan jawaban melengkapi kuesioner CPTPP.

Peran strategis Kerja Sama PBB (UNCTAD, UNESCAP, dll)

Peran strategis kerja sama PBB, termasuk organisasi seperti UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development/ Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan), UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/ Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik), serta organisasi internasional lainnya, sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kerja sama PBB menciptakan ruang untuk dialog antara negara-negara, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Forum PBB memungkinkan pertukaran ide, praktik terbaik, dan pengalaman yang penting untuk penyelesaian masalah global yang kompleks. Inisiatif PBB untuk mempromosikan dan mengawasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs. UNCTAD dan UNESCAP menerjemahkan tujuan global ini ke dalam kebijakan yang dapat diimplementasikan di tingkat nasional dan regional.

UNESCAP adalah suatu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Pasifik. UNESCAP didirikan pada tahun 1947, dan berkedudukan di Bangkok, Thailand. Saat ini UNESCAP beranggotakan 53 negara. UNESCAP bertujuan memberikan solusi-solusi terhadap tantangan ekonomi dan pembangunan di kawasan dengan bantuan teknis dan capacity building kepada negara anggotanya dalam beberapa area yaitu: kebijakan makroekonomi dan pembangunan, perdagangan dan investasi, transportasi, pembangunan sosial, lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, informasi dan komunikasi teknologi serta manajemen resiko bencana, statistik, serta kegiatan sub-regional untuk pembangunan.

UNESCAP menyediakan forum pembangunan kerja sama kawasan untuk membantu negara anggota dalam membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Secara struktural, Komisi adalah organ legislatif utama ESCAP yang mengadakan pertemuan Tingkat Menteri setahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada UN's Economic and Social Council (ECOSOC). Komisi merupakan forum antar Pemerintah negara anggota untuk meninjau dan membahas isu-isu ekonomi dan sosial serta untuk memperkuat kerja sama regional di bidang sosial ekonomi. Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik adalah organ legislatif utama ESCAP dan laporan ke PBB Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC). Komisi menyediakan sebuah forum untuk semua pemerintah daerah untuk meninjau dan membahas isu-isu ekonomi dan sosial dan untuk memperkuat kerja sama regional. Pembahasan sektor perdagangan di UNESCAP melalui **Committee on Trade, Investment, Enterprise and Business Innovation dan Paperless Trade Week**.

UNCTAD didirikan oleh PBB pada 1964, sebagai wadah mendiskusikan kepentingan negara-negara berkembang, terutama mengingat organisasi internasional yang terbentuk (IMF, World Bank, GATT/WTO) dianggap tidak mewakili aspirasi negara-negara berkembang. Pada awalnya, UNCTAD fokus pada peningkatan peran negara-negara berkembang pada perdagangan internasional. Seiring berjalannya waktu, cakupan kerja UNCTAD diperluas, di antaranya meliputi investasi, ekonomi digital, persaingan usaha, logistik, transportasi, teknologi, dll. Melalui Pertemuan-pertemuan, UNCTAD mengidentifikasi dan menyepakati proyek-proyek capacity building, bantuan teknis, riset, penyusunan laporan, dan rekomendasi kebijakan.

Mandat pembentukan UNCTAD terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu (a) consensus building, dengan memberikan platform kerja sama antar pemerintah untuk mendiskusikan isu-isu ekonomi, (b) policy-oriented analysis, yakni mengidentifikasi isu-isu kunci yang menjadi penggerak pembangunan dan merumuskannya dalam bentuk publikasi, kajian dan rekomendasi kebijakan, dan (c) technical cooperation, dengan cara membantu negara berkembang untuk meningkatkan kinerja perdagangan dan pembangunannya. Arah kebijakan UNCTAD dirancang dan disepakati bersama oleh anggota PBB melalui Komite-Komite dan Trade and Development Board (TDB) dan dikukuhkan pada UNCTAD Ministerial Conference setiap 4 tahun yang selanjutnya akan diadakan tahun 2025. Sekretaris Jenderal UNCTAD, yang dipilih setiap 4 tahun, memimpin pengelolaan tugas harian UNCTAD. Pembahasan sektor perdagangan di UNCTAD melalui Trade and Development Board serta IGE on e-Commerce and the Digital Economy.

ISU STRATEGIS

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 82 ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang tersebut, Kementerian Perdagangan telah berpartisipasi dan berperan aktif untuk mewakili Indonesia dalam berbagai perundingan dan kerjasama di forum kerja sama perdagangan yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral dengan negara lain.

Perundingan dan kerja sama juga dilakukan secara plurilateral dalam konteks regional dan multilateral serta lembaga/ organisasi internasional. Secara khusus, perundingan dan kerja sama yang tersebut meliputi *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* dan fora kerja sama perdagangan lainnya seperti *Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)*, *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)*, *International Coconut Community (ICC)*, *International Coffee Organization (ICO)*, *International Pepper Community (IPC)*, *International Tripartite Rubber Council (ITRC)*, *Group of Twenty (G-20)*, *Organisasi Kerja Sama Islam*

(OKI), *Developing Eight (D8)*, *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)*, *World Economic Forum (WEF)*, *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, dan organisasi internasional lainnya.

Isu Strategis Kerja Sama APEC

Isu utama dan penting yang dibahas pada Akses Perdagangan dan Akses Investasi APEC, antara lain: 1) Dukungan terhadap Sistem Perdagangan Multilateral yang tengah mengalami krisis kepercayaan dari sektor publik dan bisnis, menyangkut pelaksanaan fungsinya dalam mengatur tata perdagangan global sebagai forum perundingan, monitoring, dan penyelesaian sengketa; 2) Realisasi Integrasi Ekonomi Regional yang dapat memajukan akses pasar di Kawasan Asia Pasifik sesuai dengan semangat perdagangan yang bebas, terbuka, dan adil berlandaskan visi Bogor Goals, Putrajaya Vision (PV) 2040 dan *Aotearoa Plan of Actions (APA)*; 3) Rencana implementasi PV 2040 dan APA; 4) Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih berdaya saing dan berorientasi ekspor; 5) Inklusivitas dan isu berkelanjutan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui skema kerjasama ekonomi kawasan; 6) Dukungan kegiatan promosi perdagangan dan investasi di Ekonomi anggota APEC untuk memfasilitasi arus perdagangan dan investasi di wilayah APEC; dan 7) Peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional.

Hasil dari pembahasan isu-isu penting bidang akses perdagangan dan akses investasi pada forum APEC diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, penciptaan iklim bisnis yang stabil dan dapat diprediksi, kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, dan pasar yang terintegrasi di Kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut semakin memperjelas pentingnya partisipasi Indonesia dalam forum APEC sebagai *platform* bagi Indonesia untuk membangun konsensus pembentukan tata aturan perdagangan internasional yang seimbang, inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat melindungi kepentingan nasional dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil.

Isu Strategis Kerja Sama OECD dan Forum Kerja Sama Ekonomi Lainnya

Isu utama yang dibahas dalam forum kerja sama OECD bersifat *evidence-based analysis* dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas dan transformasi kebijakan domestik negara anggota terhadap isu-isu perdagangan global. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional memiliki tugas dan fungsi untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai forum perundingan OECD, antara lain pada *Ministerial Council Meeting*, *Trade Committee Meeting*, *Working Party on Trade Committee Meeting*, *Working Party on Countering Illicit Trade*, *Joint Working Party on Trade and Environment Meeting*, dan *Joint Working Party on Agriculture and Trade Meeting*.

Adapun sejumlah isu strategis utama yang dibahas dalam perundingan OECD, antara lain mencakup: 1) *OECD Index of Digital Trade Integration and Openness* (INDIGO); 2) *Cross-border Flow of Non-Personal Data* (NPD); 3) Perlindungan Hak-Hak Pekerja dalam Rantai Pasok Global; 4) Peran Sektor Jasa Bagi Penyerapan Tenaga Kerja; 5) Perlindungan *Indigenous Community* dalam Perjanjian Perdagangan Internasional; 6) Model Kuantifikasi Perdagangan Jasa (*Trade In Value Added Mode Of Supply/TiVA MOS Database*); 7) Analisis Studi Kasus Industri Mineral Kritis (untuk sektor Kobalt, Litium, Nikel); 8) Pengumpulan Data Berbasis Gender guna mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan; 9) Analisis Kuantifikasi Pengukuran Perdagangan Digital; 10) Peran Perdagangan Jasa dan Keberlanjutan Lingkungan; 11) *OECD Services Trade Restrictiveness Index* (STRI); 12) Upaya Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Fosil; serta 13) Analisis Sektor Perdagangan dalam mengatasi isu Perubahan Iklim.

Puncak pertemuan OECD terefleksikan dalam *Ministerial Council Meeting*, yang akan dilaksanakan pada 3 – 4 Juni 2025, di Paris, Prancis. Kosta Rika selaku *Chair* mendorong pembahasan atas 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

- Pilar I – *Resilience*. Penanganan krisis dan mitigasi melalui dialog serta memastikan kesetaraan di antara negara-negara dan mengatasi gangguan rantai pasok
- Pilar II – *Inclusiveness*. Perubahan menuju adopsi digital, konektivitas, serta menjembatani kesenjangan digital yang menguntungkan pekerja dan industri yang mencakup perlindungan data, partisipasi perempuan dalam sektor digital, serta etika bisnis dalam transformasi digital.
- Pilar III – *Sustainability*. Kebijakan inovatif yang mendorong solusi pengendalian perubahan iklim melalui sektor perdagangan dan investasi, investasi yang mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk peran OECD dalam mitigasi perubahan iklim di kawasan Indo-Pasifik.

Isu utama yang dibahas dalam proses aksesi keanggotaan ke OECD mencakup isu-isu yang terdapat dalam instrumen hukum OECD antara lain perdagangan yang terbuka dan transparan, pemberian kredit ekspor pemerintah yang bertanggung jawab dan tidak ditujukan untuk subsidi, serta dukungan pembiayaan dan kebijakan yang kondusif (termasuk transisi hijau dan digital) bagi UMKM dan Wirausaha. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional bertanggung jawab dalam memastikan kesesuaian peraturan dan kebijakan domestik terhadap instrumen hukum OECD terkait Komite Bidang Perdagangan.

Isu strategis G20

Terdapat 5 (lima) isu prioritas yang diangkat pada pertemuan G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) India yaitu (1) Trade for Growth & Prosperity; (2) Trade & Resilient GVCs; (3) Integrating MSMEs in Global Trade; (4) Logistics for Trade; dan (5) WTO Reform. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi

Internasional (DPAKOI) telah menghadiri pertemuan TIWG 1 pada tanggal 28 – 30 Maret 2024 di Brazil. Pertemuan TIWG 1 membahas isu prioritas (1), (2), (3), dan (4). Aspek-aspek kepentingan perdagangan Indonesia yang akan diperjuangkan pada Presidensi G20 India 2023 adalah sebagai berikut:

- Isu prioritas 1 - Trade for Growth & Prosperity: Indonesia mendorong adanya dimensi development dalam trade untuk pencapaian SDGs.
- Isu prioritas 2 - Trade & Resilient GVCs: Indonesia mendorong alih teknologi dan peningkatan partisipasi negara berkembang dalam GVC
- Isu prioritas 3 - Integrating MSMEs in Global Trade: Indonesia mendorong peningkatan kapasitas UMKM dalam akses finansial, akses informasi, dan akses teknologi
- Isu prioritas 5 - WTO Reform: Indonesia mendorong reformasi WTO, pemulihan appellate body, penguatan MTS untuk strengthening trust, dan tindak lanjut hasil-hasil MC12

Isu strategis Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Developing Eight (D-8)

Salah satu isu strategis yang penting bagi OKI adalah bagaimana meningkatkan efektivitas organisasi dalam memperjuangkan isu-isu penting yang berkaitan dengan Islam, seperti perdamaian, keamanan, dan hak asasi manusia. OKI perlu terus berinovasi dan mengembangkan program-program kerja sama yang konkrit dan berdampak positif bagi anggota OKI, serta memperkuat hubungan dengan organisasi-organisasi lain di tingkat regional dan internasional.

Sementara itu, untuk D-8, isu strategis yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kerja sama *Preferential Trade Agreement among Developing Eight Member States* (PTA D-8) yang telah disepakati oleh anggota, namun pelaksanaan perjanjian ini masih menunggu keputusan dari *supervisory committee* D-8. D-8 perlu fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti perdagangan, investasi, teknologi, dan inovasi, serta memperkuat kerja sama di bidang infrastruktur dan energi.

Isu Strategis Kerja Sama PBB (UNCTAD, UNESCAP, dll) dan Organisasi Internasional Lainnya

Isu utama yang dibahas dalam forum kerja sama UNESCAP bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial melalui kerja sama dan integrasi regional dan subregional. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional memiliki tugas dan fungsi untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai forum perundingan UNESCAP, antara lain:

- *Committee on Trade, Investment, Enterprise, and Business Innovation* yang akan diadakan di Bangkok pada 28 - 30 Mei 2025. Pertemuan akan membahas mekanisme dan perjanjian kerja sama regional dalam perdagangan dan investasi untuk pengembangan negara anggota serta kebijakan yang mendukung fasilitasi perdagangan.

- Paperless Trade Week di Bangkok pada 9-13 Juni 2025. Pertemuan bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam digitalisasi rantai pasokan, serta mendukung negara anggota dalam digitalisasi perdagangan, terutama melalui implementasi *Framework Agreement on Facilitation of Cross-Border Paperless Trade in Asia and the Pacific* (CPTA).

Sejumlah isu strategis utama yang dibahas dalam UNCTAD antara lain: (i) interdependensi dan strategi pembangunan, (ii) investasi untuk pembangunan berkelanjutan, (iii) tantangan dan peluang yang dihadapi negara berkembang dalam perdagangan internasional, (iv) perdagangan digital, dan (v) rekomendasi dan kebijakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia. DPAKOI akan berpartisipasi dalam forum perundingan UNCTAD, diantaranya:

- Trade and Development Board akan membahas interdependensi dan strategi pembangunan, investasi untuk pembangunan berkelanjutan, serta rekomendasi dan kebijakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- *IGE on e-Commerce and the Digital Economy* (Jenewa, 12-14 Mei 2025) akan membahas perkembangan ekonomi digital sehingga negara anggota dapat mendapatkan manfaat serta mengurangi kesenjangan digital.

Beberapa isu organisasi internasional lainnya antara lain:

- UNCTAD *eTrade Readiness Assessment 2025* merupakan kerja sama Pemerintah RI dengan UNCTAD dengan tujuan meninjau tingkat kematangan ekosistem dan perdagangan digital Indonesia.
- *Artificial Intelligence Action Summit* (AIAS), pertemuan diadakan oleh pemerintah Perancis dan akan membahas ekosistem AI, dampak AI, dan integrasi penggunaan AI dalam setiap sektor.
- Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF) terdiri dari 2 working group membahas transformasi digital dan perjanjian bilateral, regional, serta multilateral. Pertemuan turut membahas strategi prioritas pembangunan nasional untuk peningkatan kerja sama dengan Badan - Badan PBB di Indonesia.
- Kerja sama Selatan - Selatan dan Triangular (KSST), telah diadakan FGD oleh Kementerian Perindustrian untuk membahas identifikasi dan evaluasi kerja sama teknik di bidang industri sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2025 dalam kerangka kerja sama KSST.

PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Usaha pencapaian sasaran strategis diperkirakan akan menghadapi tantangan karena adanya resiko ketidakpastian yang masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia ke depan. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pada periode 2020-2024 diperkirakan akan cenderung

stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun. Tren negatif laju pertumbuhan ekonomi dunia juga diprediksi akan diperparah dengan ancaman resesi global akibat merebaknya pandemi Covid-19. Kejadian luar biasa yang melanda banyak negara di dunia sejak Desember 2019 ini membuat Bank Dunia dan Lembaga *International Monetary Fund* (IMF) terus merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan berkontraksi tajam sebesar -3% pada tahun 2020 yang merupakan angka terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, kondisi geopolitik, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional didasarkan pada Kegiatan Prioritas Bidang Ekonomi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan dalam Program Peningkatan Perundingan Perdagangan Internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan visi dan misi Ditjen PPI yang merupakan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia serta misi Kementerian Perdagangan, Ditjen PPI mengemban 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pasar Indonesia di pasar Internasional melalui perundingan perdagangan internasional;
2. Menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional;
3. Melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Mendorong implementasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional dalam tata aturan nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
5. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan dan perjanjian perdagangan internasional sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Ditjen PPI, DPAKOI mendukung visi dan misi Ditjen PPI yaitu pada peningkatan akses pasar Indonesia di pasar internasional melalui perundingan di forum antar kawasan dan organisasi internasional dan menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional.

Peningkatan akses pasar di forum antar kawasan dan organisasi internasional lainnya dilakukan melalui perundingan perdagangan yang intensif untuk membuka akses pasar dan fasilitasi perdagangan. Perwujudan tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia dilakukan melalui perundingan perdagangan yang berkualitas untuk mengajukan kepentingan perdagangan Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional.

Sementara itu, melalui keterlibatan pada berbagai fora organisasi komoditi internasional, dapat diupayakan stabilisasi harga komoditas melalui upaya diplomasi pada perundingan berbagai organisasi komoditi internasional dimaksud. Secara khusus, masing-masing organisasi memiliki mekanisme tertentu, seperti ITRC yang memiliki mekanisme *Supply Management Scheme (SMS)*, *Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)*, dan *Strategic Market Operation (SMO)*. Keempat organisasi lainnya memiliki mekanisme stabilisasi harga secara eksplisit yang dibahas dalam agenda pelaporan situasi pasar komoditas dan pelaporan

data statistik. Kedua pembahasan agenda tersebut akan mengerucut pada pembahasan stabilisasi harga komoditas yang didasarkan pada situasi pasar dan tranparansi data statistik negara anggota. Berdasarkan agenda pembahasan dimaksud, organisasi komoditas internasional mengeluarkan laporan resmi harga komoditas internasional pada situs mereka. Laporan ini juga secara rutin disampaikan kepada para petani di tingkat domestik, seperti informasi harga lada melalui sms yang diberikan oleh IPC bagi petani terdaftar di Indonesia.

Target kinerja Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada tahun 2024 fokus kepada perundingan perdagangan internasional di fora Antar Kawasan dan Organisasi Internasional yang tercermin melalui sasaran, antara lain: 1) Meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional; 2) Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia; dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini: 3) Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan Antar Kawasan dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Tabel 4.
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024 BERDASARKAN
RENCANA STRATEGIS DJPPI

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional					
Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional (Kegiatan)	4	4	5	5	6
Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia					
Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)	80	80	80	80	80
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (%)	77	79	81	83	85

Sumber: DPAKOI (2025)

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mencakup Sasaran Program, Indikator Kinerja, Satuan, Target, dan Anggaran, sebagaimana terdapat pada Lampiran 2. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam Pelaporan Kinerja DPAKOI tahun 2024, dimana secara keseluruhan terdapat tiga Indikator Kinerja dari dua Sasaran Program yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Tabel. 5 Perjanjian Kinerja DPAKOI Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	6 (kegiatan)
2	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	80 (persen)
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional	Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	85 (persen)

Sumber: DPAKOI (2025)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kendala pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kinerja Nomor: 01/PPI/PK/01/2021, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2024 terdiri dari 3 Sasaran Program ditunjang dengan 3 Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif selama periode Tahun 2024. Perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Rumus pengukuran capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2024 menggunakan metode perhitungan sesuai dengan karakter indikator kinerja masing-masing.

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja: Rumus perhitungan ini digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin besar nilainya. Persentase capaian kinerja diharapkan sesuai dengan (atau melebihi) prediksi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Realisasi} \times 100\% \text{ Target}$$

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pada pelaksanaan RPJMN 2020 - 2024 dan RENSTRA serta program Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Direktorat Perundingan Multilateral memiliki tiga sasaran strategis dan tiga indikator kinerja strategis yang menggambarkan kinerjanya merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Masing-masing indikator akan dilaporkan realisasi dan capaian secara periodik tiga bulanan, untuk mengetahui dan mengukur perkembangannya. Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan target 2024 sesuai dengan RENSTRA 2020-2024. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional dalam pengukuran kegiatan melakukan evaluasi pertiga bulan selama, empat kali selama setahun dalam bentuk Pencapaian Program Sasaran (PPS) maka terdapat PPS pada triwulan I, II, III dan IV pada tahun 2024. Dalam rangka peningkatan kerja sama perdagangan multilateral, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Kinerja Organisasi

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional				
	1 Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional	Kegiatan	6	6	100
2.	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
	2 Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	86.7	108.3
3.	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional				
	3 Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	Persen	85	89.75	105.6
Rata-rata Capaian Tahun 2024					104,7

Sumber: DPAKOl (2025)

Terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan, yaitu meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia, dan Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional.

Dalam sasaran meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional dengan indikator kinerja jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional mencakup 3 (tiga) indikator kinerja yang terdiri dari:

- a. Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.
- b. Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional.
- c. Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional.

Sasaran Program 1
Meningkatnya akses pasar barang di Antar Kawasan dan Organisasi Internasional

Indikator Kinerja Program 1:

Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional

Cara Perhitungan:

$$KS_t = \sum KS_{jt}$$

KS_t= Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional di tahun berjalan

KS_{jt}= Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional di tahun berjalan

Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

INDIKATOR	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (kegiatan)	5	5	100	6	6	100

Sumber: DPAKOI (2025)

Untuk Perbandingan antara capaian kinerja kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir tidak terdapat sumber pendukung.

Tabel 8. Rincian Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	Rincian Target	REALISASI	PERSEN TASE
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	(6 kegiatan)	Kegiatan APEC Akses: CTI 1, CTI 2, MRT, CTI 3, AELW	6 kegiatan	100%
		Kegiatan APEC Fasilitas: CTI 1, CTI 2, MRT, CTI 3, AELW		
		Kegiatan Komoditi		
		Kegiatan D8/OKI: COMCEC TWG		
		Kegiatan OI Lainnya: UNESCAP		

Sumber: DPAKOl, (2025)

Integrasi ekonomi melalui perdagangan internasional akan melahirkan kompetisi yang berujung pada peningkatan kegiatan akses pasar yang dapat memberikan dampak positif kepada lingkungan. Di sisi lain, keterbukaan akses pasar barang antar negara memberikan dampak bagi keterbukaan informasi dan komunikasi.

B. KEGIATAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Forum Antar Kawasan fokus pada peningkatan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan kawasan melalui kerja sama teknis antar anggota Ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Berbagai inisiatif yang diajukan oleh Ekonomi proponen memberikan dampak positif dalam penyusunan kebijakan berdasarkan praktik terbaik untuk memfasilitasi perdagangan yang diharapkan dapat berdampak secara positif pada peningkatan akses pasar barang. Sepanjang tahun 2024, komite perdagangan dan investasi APEC melaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan

1. Kerja Sama APEC

First APEC Committee on Trade and Investment (CTI1) Meeting

Pertemuan pertama komite perdagangan dan investasi APEC telah dilaksanakan di Lima, Peru tanggal 4 – 5 Maret 2024. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional yang fokus memperhatikan isu prioritas di bidang inovasi dan digitalisasi untuk memfasilitasi transisi usaha informal ke formal. Keketuaan Peru diantaranya membahas hasil Konferensi Tingkat Menteri ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia/ World Trade Organisation (WTO) di Abu Dhabi, Persatuan Uni Emirat Arab (PEA) yang menghasilkan Deklarasi Menteri Abu Dhabi, upaya perwujudan Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) melalui penekanan serangkaian program peningkatan kapasitas, identifikasi isu perdagangan dan investasi yang terus berkembang, serta pembentukan mekanisme berbagi informasi yang bermanfaat bagi semua Ekonomi anggota.



Gambar 2. Partisipasi Delegasi RI pada Pertemuan APEC CTI 1 2024

Dalam pertemuan ini, Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan perkembangan implementasi perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Delri juga menyampaikan dukungan *co-sponsorship* untuk inisiatif Peru terkait upaya formalisasi UMKM dan diskusi provisi UMKM yang diusulkan Malaysia secara intersesi. Partisipasi aktif dalam rangkaian dialog FTAAP perlu dilakukan untuk memastikan kepentingan nasional sejalan dengan target capaian Tuan Rumah Peru untuk APEC 2024.

Second APEC Committee on Trade and Investment (CTI2) Meeting

DPAKOI telah berpartisipasi dalam pertemuan APEC Second Committee on Trade and Investment (CTI2) pada 13 – 14 Mei 2024 di Arequipa, Peru. Pertemuan membahas kelanjutan kerja dan implementasi komitmen APEC untuk memprioritaskan integrasi ekonomi regional melalui FTAAP, upaya fasilitasi perdagangan, dan dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral.

Indonesia menyampaikan (i) pentingnya kerja sama antar pemerintah dan pihak swasta dalam mengatasi tantangan ekonomi global; (ii) mencatat baik rekomendasi ABAC untuk memajukan agenda FTAAP melalui pendekatan "top-down" dan "bottom-up", dengan fokus pada upaya peningkatan kapasitas secara luas; (iii) pentingnya peran APEC dalam mendukung sistem perdagangan multilateral melalui rekomendasi strategis berdasarkan konsensus dan prinsip sukarela; dan (iv) prinsip kerja sama harus menjadi inti dari pekerjaan FTAAP, dengan fokus pada mempersempit perbedaan, dan mendorong agar pekerjaan FTAAP dapat berkontribusi dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).



Gambar 3. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Memimpin Delegasi RI pada Pertemuan APEC CTI 2 2024

Dalam kesempatan ini, Indonesia juga berkesempatan menyampaikan kelanjutan implementasi perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yakni pembentukan RCEP Support Unit (RSU), persiapan pertemuan tingkat Menteri RCEP (RCEP Ministerial Meeting/RMM), Economic and Technical Cooperation (ECOTECH) pada RCEP, dan prosedur akses RCEP.

Ministers Responsible for Trade (MRT) Meeting

Pada 17 – 18 Mei 2024, Menteri Bidang Perdagangan (MRT) dari Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) bertemu di Arequipa, Peru, untuk menguatkan komitmen APEC dalam mendukung sistem perdagangan multilateral, meningkatkan kerja sama dalam kerangka perdagangan bebas di Kawasan Asia Pasifik (FTAAP) serta mendorong digitalisasi dan inklusivitas dalam perdagangan.

Dalam pertemuan ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak Ekonomi APEC untuk menyuarakan semangat inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan. Selain itu, Ekonomi APEC perlu menyuarakan aspek pembangunan berkelanjutan untuk ekosistem perdagangan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Pertemuan berhasil menyepakati Pernyataan Bersama Menteri Perdagangan APEC 2024 untuk mencatat capaian kerja sektor perdagangan di kawasan APEC termasuk mandat untuk melaporkan hasil dialog terkait FTAAP pada pertemuan tingkat Menteri di rangkaian KTT APEC 2024.

Selain itu, di sela-sela pertemuan APEC MRT, Menteri Perdagangan juga melakukan pertemuan bilateral dengan Selandia Baru, Jepang, Kanada, dan Korea Selatan untuk membahas isu-isu strategis peningkatan perdagangan

dengan mitra dagang, termasuk pembahasan dan pemanfaatan perundingan perjanjian perdagangan.



Gambar 4. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Mendampingi Menteri Perdagangan RI pada Pertemuan APEC *Minister Responsible for Trade Meeting (MRT) 2024*

Joint Meeting of Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade

Tuan Rumah Peru menginisiasi Pertemuan Bersama Menteri Urusan Perempuan dan Menteri Urusan Perdagangan APEC dalam rangkaian pertemuan tingkat Menteri Perdagangan APEC di Arequipa, Peru tanggal 17 Mei 2024.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengemukakan Indonesia mendorong Ekonomi APEC untuk menetapkan prioritas nasional dalam membangun dasar infrastruktur untuk memajukan dan memberdayakan partisipasi perempuan dalam perdagangan internasional. Kerja sama dan kolaborasi melalui APEC juga harus menyoroti pada perempuan yang menghadapi beragam bentuk tantangan kesenjangan sehingga membuka peluang dalam memajukan partisipasinya di perdagangan global.

Pertemuan ini menghasilkan pernyataan bersama antara Menteri Bidang Perempuan dan Menteri Bidang Perdagangan APEC untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui perdagangan di kawasan Asia Pasifik.



Gambar 5. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional mewakili Menteri Perdagangan RI pada Pertemuan Joint Meeting of Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade

Third APEC Committee on Trade and Investment (CTI 3) Meeting

Perwakilan Delegasi RI, mewakili Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, menghadiri pertemuan ketiga komite perdagangan dan investasi APEC di Lima, Peru tanggal 21 – 22 Agustus 2024.

Indonesia menyampaikan perkembangan Concept Notes (CN) Indonesia yaitu (i) Best Practices on Trade Facilitation for MSMEs: Shaping Better Opportunity in the Regional and Global Value Chains; dan (ii) Workshop Towards Digital Trade Ecosystem in the Asia Pacific Region. Kedua CN telah disetujui secara intersesi dan saat ini dalam proses penilaian untuk mendapatkan pendanaan Sekretariat APEC. Sebagai Co-Chair Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia melaporkan kemajuan implementasi RCEP, khususnya terkait pembentukan RCEP Support Unit (RSU), persiapan pertemuan Menteri RCEP yang Ketiga pada September 2024, serta pemanfaatan RCEP Economic and Technical Cooperation (ECOTECH) dan prosedur akses RCEP. Pertemuan CTI3 APEC 2024 mencatat 9 (sembilan) proposal dengan pendanaan APEC serta 8 (delapan) proposal self-funded yang telah disepakati secara intersesi, dan sepuluh laporan sub-fora di bawah CTI.

Pada pembahasan agenda *Integrasi Ekonomi di Kawasan*, terkait agenda FTAAP, Indonesia menekankan pentingnya prinsip kerja sama dalam agenda FTAAP di

fora APEC. Sebagai forum inkubator ide, APEC perlu fokus untuk mempersempit divergensi diantara ekonomi APEC dan dengan pendekatan diskusi yang lebih berimbang dan fleksibel. Manfaat FTAAP harus inklusif dan adil agar dapat berkontribusi dalam mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)*.



Gambar 6. Perwakilan Delegasi RI berpartisipasi pada *Third APEC Committee on Trade and Investment (CTI 3) Meeting*

APEC Economic Leaders Week (AELW) Meeting

Menteri Perdagangan Budi Santoso menghadiri rangkaian pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC Economic Leaders Week (AELW) 2024, di antaranya Pertemuan Menteri APEC 2024, di Lima, Peru, pada 13 – 15 November 2024. Selain itu, Mendag Budi juga mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2024.

Mendag Budi mengungkapkan, Indonesia berkomitmen memberikan dukungan terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), termasuk penyelesaian segera sistem penyelesaian sengketa, akses pasar yang adil bagi produk pertanian, dan dukungan bagi UMKM serta penguatan peran perempuan dalam perdagangan. Terkait agenda Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (Free Trade Area of The Asia Pasifik/FTAAP), Indonesia mendorong integrasi regional berbasis inklusivitas, digitalisasi, dan ketahanan rantai pasok dengan tetap mempertimbangkan perbedaan kapasitas anggota Ekonomi APEC.

Beberapa dokumen pernyataan bersama berhasil dicapai dalam rangkaian pertemuan KTT APEC 2024 yang terkait dengan isu perdagangan meliputi:

- a. Pernyataan Bersama Menteri APEC untuk memperkuat kerja sama perdagangan inklusif, inovasi digital dan pertumbuhan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.
- b. Ichma Statement on A New Look on the FTAAP, yang menegaskan relevansi pembahasan FTAAP dalam konteks perkembangan dan dinamika perekonomian global, termasuk isu baru dalam berbagai FTAs.

Dalam dialog dengan Pemimpin Ekonomi APEC lainnya, Presiden RI menegaskan komitmen pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan. Beberapa area kerja sama yang perlu didorong dalam kerangka APEC meliputi swasembada pangan, pembangunan infrastruktur digital, serta energi terbarukan dan transisi ekonomi hijau.

Di sela-sela rangkaian KTT APEC Menteri Perdagangan melakukan pertemuan bilateral dengan Korea Selatan, Hong Kong-China, Jepang, Singapura dan Kanada untuk membahas kerja sama peningkatan perdagangan dengan negara mitra, antara lain melalui percepatan perundingan perdagangan bebas dan pemanfaatan perjanjian perdagangan.



Gambar 7. Menteri Perdagangan RI didampingi oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional pada rangkaian Pertemuan APEC *Economic Leaders Week (AELW) 2024*

Selaku instansi penjurur bidang akses pasar, dapat dicatat kontribusi Indonesia pada pertemuan *Market Access Group (MAG)* antara lain : (i) menyelesaikan pembahasan *Environmental Goods (EGs)* yang merupakan mandat Menteri APEC yaitu dengan partisipasi aktif dalam memberikan masukan dan tanggapan pada Kerangka Diskusi untuk Menyusun Daftar Referensi Barang Lingkungan

APEC yang bersifat sukarela dan tidak mengikat; dan menyelesaikan transposisi atas Daftar Barang Lingkungan APEC ke HS 2022; (ii) melanjutkan dukungan terhadap Sistem Perdagangan Multilateral melalui penerapan Perjanjian WTO; dan mempromosikan fasilitasi dan konektivitas perdagangan melalui kegiatan yang diprogramkan dalam Aliansi APEC untuk Konektivitas Rantai Pasokan (*APEC Alliance on Supply Chain Connectivity - A2C2*).

2. Kerja Sama OECD dan Forum Kerja Sama Ekonomi Lainnya

OECD Working Party of The Trade Committee

Sebagai salah satu kandidat negara aksesi ke OECD, Indonesia dipandang perlu berpartisipasi aktif dalam forum kerja sama OECD guna mendorong familiarisasi pertemuan dan pemahaman ruang lingkup perundingan. Semenjak Indonesia menerima *Accession Roadmap* pada bulan Mei 2024, Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah berpartisipasi aktif pada pertemuan *OECD Working Party of the Trade Committee* (WPTC), tanggal 12 dan 13 Desember 2024 secara daring.

Dalam pembahasan mengenai studi kasus dampak pembatasan ekspor mineral kritis (kobalt, litium, dan nikel) dengan Indonesia sebagai salah satu sampel negara studi, Indonesia menyampaikan perkembangan posisi dalam mendorong kelanjutan pembahasan isu mineral kritis di forum kerja sama lainnya seperti Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA). Komitmen ini mencerminkan sikap proaktif Indonesia untuk menyelaraskan tujuan transisi hijau dalam memanfaatkan potensi sumber daya mineral untuk produk yang bernilai tambah.

Indonesia juga menyampaikan perkembangan terkini pada dokumen OECD 'A Preliminary Mapping of Measures Affecting the Cross-Border Flow on Non-Personal Data', antara lain:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa 'Penyedia yang mengembangkan Perangkat Lunak khusus untuk suatu Instansi, wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada Instansi yang bersangkutan'.
- Amandemen Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 9 menyebutkan bahwa 'Pengembang yang menyediakan Perangkat Lunak yang khusus dikembangkan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik, wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada Instansi atau institusi yang bersangkutan'. Ayat (5) menyebutkan bahwa 'Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib menjamin kerahasiaan kode sumber Perangkat Lunak yang digunakan dan hanya digunakan untuk kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik'.

- Amandemen Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal 45 ayat (1) (a) menyebutkan bahwa 'Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing wajib: menunjuk Tenaga Kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing.

Pada pembahasan penguatan kemitraan OECD di kawasan Asia Tenggara (yang mencakup Indonesia, Malaysia dan Filipina), sekretariat OECD mengapresiasi keberterimaan dan antusiasme Pemerintah Indonesia terhadap hasil studi yang dirilis pada Oktober 2024 mengenai *OECD Services Trade in Indonesia: Exploring Patterns, Policies, and Reform Scenarios*. Studi dimaksud dipandang dapat memperkuat pemahaman kekuatan sektor jasa spesifik di Indonesia dan mendorong penguatan inisiatif *ASEAN Services Facilitation Network*. Di samping itu, Indonesia dapat terus memanfaatkan *OECD Services Trade Restrictiveness Index* (STRI) untuk mengidentifikasi sektor jasa yang memiliki hambatan tinggi secara nasional dan hambatan sektor jasa di sejumlah negara mitra.

3. Kerja Sama Organisasi Komoditas Kelapa, Lada dan Sawit

Hasil Pertemuan International Coconut Community (ICC)

Sejak tahun 1976, kantor Sekretariat ICC berbasis di Jakarta dan dipimpin oleh Direktur Eksekutif. Sebagai salah satu anggota pendiri ICC, Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif strategis di dalamnya. Ini termasuk menjadi anggota Technical Working Group yang merupakan tim inti penyusunan kebijakan di ICC; mendukung penyediaan data statistik; dan menjadi *host country* Sekretariat ICC. Saat ini, posisi Direktur Eksekutif ICC dipegang oleh perwakilan Indonesia, yang membantu meningkatkan pengaruh dan visibilitas Indonesia dalam ICC.

Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah dalam Sesi Tahunan ke-59/Pertemuan Tingkat Menteri Komunitas Kelapa Internasional (International Coconut Community/ICC) di Bandar Lampung pada 5 - 7 Desember 2023. Sesi Tahunan ke-59 ICC dibuka oleh Menteri Perdagangan RI dan dihadiri oleh perwakilan 15 negara anggota ICC termasuk Menteri Pariwisata, Perdagangan, Industri, dan Koperasi Kiribati dan Wakil Menteri Pertanian dan Perikanan Samoa, serta perwakilan organisasi internasional.

Pada Pertemuan Sesi Tahunan ke-59 ICC, Indonesia menyampaikan laporan negara mengenai situasi kelapa dan industri kelapa di Indonesia. Indonesia juga berperan aktif dalam merevisi Rencana Strategis lima tahun ICC, dengan fokus pada pencapaian Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan menekankan keterlibatan perempuan dan anak muda dalam sektor kelapa.

Bergabungnya Pantai Gading sebagai anggota baru diharapkan akan meningkatkan posisi tawar negara-negara anggota ICC dalam industri kelapa. Indonesia juga mendukung Papua Nugini sebagai penyelenggara Hari Kelapa Sedunia tahun 2024, yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program PBB sebagai upaya meningkatkan pemahaman global akan pentingnya kelapa dalam kehidupan sehari-hari serta mengapresiasi kontribusinya terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Perdagangan selaku instansi penjuror berpartisipasi aktif pada kegiatan yang diselenggarakan oleh ICC diantaranya:

- Konferensi dan Pameran COCOTECH ke-51 (22–25 Juli 2024, Surabaya, Indonesia)



Gambar 8. Presiden membuka acara dan menyampaikan sambutan pada Konferensi dan Pameran COCOTECH ke-51 di Surabaya

Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan International Coconut Community (ICC) menyelenggarakan Konferensi dan Pameran Internasional COCOTECH ke-51 pada tanggal 22-25 Juli 2024 di Surabaya, dengan tema “Harnessing Coconut’s Potential as the Tree of Life and Green Energy”. COCOTECH merupakan konferensi dan pameran kelapa internasional yang diselenggarakan ICC setiap dua tahun untuk mempromosikan sektor perkelapaan global. Konferensi ini dihadiri oleh total 327 peserta yang terdiri dari perwakilan 16 negara anggota ICC, 14 negara non-anggota ICC, dan 12 organisasi internasional. Acara dibuka oleh sambutan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya peningkatan produktivitas dan hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah produk kelapa di Indonesia, dukungan terhadap industri berkelanjutan, dan penciptaan lapangan kerja.

COCOTECH ke-51 menghadirkan 39 narasumber yang dibagi dalam 9 sesi diskusi. Selain konferensi, pameran produk berbasis kelapa juga digelar yang diikuti 36 stan peserta dari 6 negara. Pameran ini menghadirkan perusahaan mikro hingga industri besar, pemasok, asosiasi kelapa, dan lembaga penelitian yang menampilkan tren industri kelapa terkini secara global yang memiliki teknologi inovatif, serta produk yang dapat dipasarkan. Pameran COCOTECH ke-51 juga sukses mendapatkan peluang investasi terkait Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bioavtur di Indonesia sebesar empat ratus miliar rupiah dan meraup potensi transaksi mencapai USD 18 juta.

Menutup rangkaian kegiatan COCOTECH ke-51, peserta mengikuti kunjungan lapangan yang diadakan ke 3 perusahaan produk olahan kelapa yang berlokasi di Gresik, yaitu PT. Sarana Agro Indojaya (SAINDO), PT. Sionchem Global Indo, dan PT. Surya Trimegah Wisesa, menjadi sarana bertukar wawasan terkait proses pengolahan kelapa dari hulu hingga hilir dan pengalaman praktik pengolahan kelapa yang berkelanjutan dan bernilai tambah.

- Pertemuan ICC Coconut Genetic Resources for Enhanced Livelihood (COGENT) Steering Committee.



Gambar 9. Pertemuan ICC COGENT Steering Committee di Surabaya

Pertemuan ICC-COGENT diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Tujuan pertemuan ICC-COGENT *Steering Committee* adalah membahas penguatan sumber daya genetik kelapa antarnegara anggota melalui pertukaran plasma nutfah (*germplasm*), konservasi dan implementasi penyimpanan bank genetik (*genebank*).

Pertemuan menghasilkan 10 (sepuluh) rekomendasi prioritas COGENT dalam memperkuat penyediaan sumber daya genetik kelapa, riset dan pengembangan budidaya, yang mencakup: 1) promosi keberlanjutan, 2) adopsi tindakan strategis dan mempercepat implementasi, 3) percepatan

upaya kolaboratif, 4) implementasi rekomendasi, 5) perumusan hubungan efektif antara COGENT dan ICC, 6) penyelenggaraan pertemuan konsultasi, 7) peningkatan sistem komunikasi antara COGENT, ICC dan institusi relevan lainnya, 8) penyusunan SOP, 9) identifikasi sumber pendanaan untuk program riset dan pengembangan, dan 10) promosi sumber daya genetik kelapa.

- World Coconut Day (WCD) 2024



Gambar 10. World Coconut Day 2024 di Port Moresby, Papua Nugini
Rangkaian acara World Coconut Day (WCD) atau Hari Kelapa Sedunia diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober - 4 September 2024 di Port Moresby, Papua Nugini. Diperingati setiap tanggal 2 September, WCD merupakan perayaan global terhadap komoditas kelapa yang menyoroti pentingnya kelapa dalam pertanian, industri, dan masakan sekaligus meningkatkan kesadaran tentang tantangan yang dihadapi petani kelapa dan perlunya praktik produksi kelapa berkelanjutan.

Mengusung tema "Kelapa untuk Ekonomi Sirkular: Membangun Kemitraan untuk Nilai Maksimum", peringatan Hari Kelapa Sedunia ini menyoroti kolaborasi dan keberlanjutan dalam industri kelapa. Aktivitas meliputi konferensi, pameran, kunjungan lapangan, dan kompetisi, yang menghasilkan rekomendasi terkait praktik berkelanjutan, diversifikasi varietas untuk mencegah penyakit, promosi manfaat kesehatan kelapa, dan pengembangan teknologi nilai tambah seperti fermentasi dan esterifikasi air kelapa.

- Pertemuan ICC Technical Working Group (TWG) tanggal 22 November 2024.
Pertemuan ICC TWG dilaksanakan di Kolombo, Sri Lanka pada tanggal 22 November 2024. Pertemuan ini merevisi beberapa aturan, antara lain:

- a. Mengubah istilah "ICC Session" menjadi "ICC Session and Ministerial Meeting";
 - b. Meredefinisi jabatan Direktur Eksekutif menjadi Direktur Jenderal;
 - c. Menetapkan status "Associate Member Country" untuk negara yang berkontribusi dalam impor produk kelapa;
 - d. Memperbarui aturan pemungutan suara, pembatasan anggaran perjalanan, usia pensiun staf, dan proses perekrutan; dan
 - e. Menyepakati dokumen terkait ICC-COGENT, revisi gaji, dan aturan pelaksanaan kegiatan ICC.
- Sesi Tahunan ke-60/Pertemuan Tingkat Menteri ICC



Gambar 11. Sesi Tahunan ke-60/Pertemuan Tingkat Menteri ICC di Kolombo, Sri Lanka

Sesi Tahunan ke-60/Pertemuan Tingkat Menteri ICC dilaksanakan di Kolombo, Sri Lanka pada tanggal 25-27 November 2024. Pertemuan ini membahas berbagai isu penting terkait industri kelapa, antara lain laporan situasi kelapa dari negara anggota, tantangan dalam sektor kelapa, serta ancaman dari pedoman WHO mengenai minyak kelapa murni (VCO) yang mengklasifikasikan VCO sebagai lemak jenuh. Selain itu, pertemuan menyepakati klasifikasi baru untuk kopra Grade D yang tidak layak konsumsi manusia namun dapat digunakan sebagai biofuel. Hal ini merespons inisiatif International Civil Aviation Organization (ICAO) yang memasukkan kopra nonstandar dalam daftar bahan baku bioavtur berkelanjutan, membuka peluang pasar baru dan meningkatkan peran kelapa dalam energi hijau.

ICC juga memperkuat kerja sama pendidikan melalui MoU dengan Universitas Sam Ratulangi yang menawarkan beasiswa bagi negara anggota. Selain itu, program pemberdayaan pemuda dan perempuan di sektor kelapa terus dikembangkan melalui pelatihan dan magang di industri terkait. Indonesia telah menominasikan dua peserta untuk program

tersebut, sementara ICC masih mencari donor untuk mendanai peserta dari setiap negara anggota. Dalam pertemuan ini, juga disepakati perpanjangan masa jabatan Direktur Jenderal ICC, Dr. Jelfina C. Alouw, hingga Januari 2027. Ke depan, Sri Lanka akan menjadi tuan rumah World Coconut Day 2025, sementara ICC ke-61 akan diadakan di Thailand pada tahun yang sama.

Hasil Pertemuan International Pepper Community (IPC)

Keanggotaan Indonesia di IPC didasarkan kepada Keputusan Presiden RI Nomor 51 Tahun 1971 tentang Mengesahkan “*Agreement Establishing Pepper Community*” sebagai Hasil Inter Governmental Consultations of Regional Cooperation in Pepper in Asia”. Tidak hanya sebagai anggota penuh, Indonesia juga memiliki kedudukan penting pada IPC sebagai salah satu pendiri.

Sebagai salah satu pendiri IPC, Indonesia melakukan berbagai inisiatif strategis di IPC, antara lain sebagai penggagas peninjauan kembali *Agreement Establishing the International Pepper Community* untuk melihat korelasinya dengan kondisi terkini; sebagai inisiator pengaktifan kembali IPC *Interlaboratory Proficiency Testing Programme* yang bertujuan memberi pelatihan untuk peningkatan mutu; mendukung penyediaan data statistik yang lebih akurat oleh Sekretariat IPC; serta merevisi IPC Method of Sampling for Chemical Analysis yang telah diselaraskan dengan CODEX dan ASTA.

Kementerian Perdagangan selaku instansi penjuror berpartisipasi aktif pada kegiatan yang diselenggarakan oleh IPC diantaranya:

- Pertemuan ke-13 Komite Research & Development (R&D), 5 Agustus 2024



Gambar 12. Pertemuan ke-13 Komite Research & Development (R&D) IPC di Kochi, India
Pertemuan ke-13 Komite R&D IPC dilaksanakan di Jakarta, Indonesia pada 5 Agustus 2024 di India. Diselenggarakan secara *hybrid* dari India, pertemuan ini membahas:

- a. Penetapan standar maksimum residu lada dengan menyepakati pengujian residu di tiap negara anggota sebelum disampaikan ke CODEX.

- b. Pembentukan panel editor untuk Jurnal Focus on Pepper, yang akan terdiri dari pakar berpengalaman lebih dari 10 tahun dari berbagai bidang terkait.
 - c. Proyek ketertelusuran lada untuk memetakan potensi kesamaan DNA dan profil kimia antaranggota IPC memunculkan draf Memorandum of Understanding (MoU). Namun, karena perbedaan posisi antarnegara, proyek ini akhirnya dibatalkan.
 - d. Laporan biaya produksi lada dari negara anggota dengan perbedaan signifikan, sementara Indonesia belum memberikan data untuk tahun 2024.
- Pertemuan ke-10 Komite Pemasaran, 17-18 September 2024



Gambar 13. Pertemuan ke-10 Komite Pemasaran IPC di Bandung

Pertemuan ke-10 Komite Pemasaran IPC diselenggarakan di Bandung pada 17-18 September 2024. Berlangsung secara hybrid, pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan, Indonesia, dan membahas:

- a. Tindak lanjut hasil pertemuan sebelumnya, seperti pengembangan analitik statistik IPC dan negosiasi keanggotaan IPC di European Spice Association.
- b. Laporan penurunan produktivitas lada di semua negara anggota serta penolakan pengiriman akibat residu pestisida di negara konsumen.
- c. Pengembangan aplikasi IPC Super App untuk mendukung petani dan transparansi harga.
- d. Usulan relokasi kantor IPC ke Ho Chi Minh City yang kembali diajukan Vietnam, tetapi ditolak oleh sebagian besar anggota.

- Pertemuan ke-30 Komite Mutu



Gambar 14. Pertemuan ke-10 Komite Mutu IPC di Putrajaya, Malaysia

Pertemuan ke-30 Komite Mutu IPC diselenggarakan pada 7-8 Oktober 2024 di Putrajaya, Malaysia. Pertemuan members:

- a. Usulan Indonesia terkait pelatihan mutu dan pengolahan lada serta penerapan blockchain untuk ketertelusuran produk.
- b. Penyusunan standar light berries lada hitam, di mana pertemuan memutuskan untuk fokus pada harmonisasi standar CODEX.
- c. Laporan Indonesia atas hasil uji profisiensi dari 35 laboratorium anggota IPC, dengan 64,9% hasil "memuaskan" dan 23,7% "tidak memuaskan". Laporan ini menegaskan pentingnya uji profisiensi untuk menjaga standar mutu laboratorium.

- Rangkaian Pertemuan Eksekutif Heads of Delegations (HoD) ke-52, 18–21 November 2024



Gambar 15. Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Menghadiri Pertemuan Eksekutif Heads of Delegations (HoD) ke-52 di Kolombo, Sri Lanka

Pertemuan ini membahas sejumlah agenda penting, antara lain:

- a. Berdasarkan rotasi, Indonesia akan menduduki posisi ini. Sdri. Marina Novira Anggraini ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif IPC periode 2025–2028, mulai Mei 2025.
- b. Evaluasi kerja IPC 2022–2024 dan rekomendasi Indonesia mendorong rencana kerja tiga tahun berikutnya untuk fokus pada program yang berdampak langsung dan pengembangan promosi melalui media sosial.
- c. Perdebatan terkait interpretasi mekanisme hak suara pasal 6 ayat (3) Perjanjian Pendirian IPC, terkait kontribusi merata dengan sistem one country one vote belum mencapai mufakat.
- d. Penolakan Indonesia, Sri Lanka dan Malaysia terhadap usulan Vietnam merelokasi kantor IPC ke Ho Chi Minh City, Vietnam. Sedangkan India memberi kesempatan bagi Vietnam untuk mengajukan proposal resmi.
- e. Beberapa diskusi penting terkait situasi lada global mencakup regulasi AS yang lebih ketat terhadap keamanan pangan dan kenaikan tarif impor, dampak perubahan iklim pada produktivitas lada, mendorong penelitian varietas unggul dan produk bernilai tambah, potensi pasar Jepang untuk lada berkelanjutan, dan prediksi penurunan produksi lada pada 2025 di tengah permintaan yang meningkat, berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan pasar.

4. Kerja Sama Organisasi Komoditas Karet, Kopi dan Komoditas Lainnya

Hasil Pertemuan International Tripartite Rubber Council (ITRC)

Rangkaian Pertemuan International Tripartite Rubber Council (ITRC) ke-39 telah diselenggarakan tanggal 23 – 27 September 2024 di Bangkok, Thailand. Dalam rangkaian ini, dilakukan Pertemuan Komite Statistik ke-36; Pertemuan Komite Sustainable Natural Rubber (SNR) ke-5; Pertemuan Komite Demand Promotion Scheme (DPS) ke-17; dan diakhiri Pertemuan ITRC ke-39. Seluruh negara anggota ITRC (Thailand, Indonesia dan Malaysia/TIM) hadir secara fisik pada rangkaian pertemuan tersebut.

Sekretariat menyampaikan perkembangan 3 (tiga) model proyeksi kebutuhan dan harga karet alam dengan variabel yang paling sering digunakan adalah 1) harga Natural Rubber (NR) di pasar fisik; 2) nilai tukar dengan Dolar Amerika Serikat; 3) harga NR di pasar berjangka; dan 4) pasokan/produksi karet alam. Komite menyepakati model proyeksi hanya akan berfokus pada variabel fundamental untuk karet alam. Adapun model hanya digunakan untuk internal ITRC dan sebagai pendukung penyusunan kebijakan serta simulasi bagi TIM.

Pertemuan menyepakati untuk memfokuskan pengembangan panduan umum ITRC untuk keberlanjutan karet alam. Sekretariat akan mengidentifikasi prinsip umum yang digunakan tiap negara anggota serta dari dokumen internasional seperti Forest Stewardship Council (FSC), FAO Sustainability Assessment of Food and Agriculture (SAFA), dan European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Pertemuan sepakat menugaskan Sekretariat untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait bursa karbon global untuk sektor khusus seperti pertanian.

Disela rangkaian Pertemuan ITRC, dilakukan pertemuan informal antara ketua delegasi ITRC dengan delegasi pihak swasta dari Pantai Gading, yang antara lain terdiri dari Presiden The Association of Natural Rubber Professionals of Côte d'Ivoire (APROMAC) dan Direktur Eksekutif he Interprofessional Fund for Agricultural Research and Advice (FIRCA). Perwakilan delegasi Pantai Gading memaparkan kondisi perkebunan karet yang 90% lahan adalah milik petani kecil. Atas tawaran ITRC, delegasi Pantai Gading menyatakan keinginannya untuk dapat bergabung dengan ITRC, dan mengundang seluruh negara anggota ITRC untuk hadir pada Hari Karet Alam di Pantai Gading pada 24 – 26 Oktober 2024.

Pertemuan menyepakati usulan yang disampaikan Pimpinan Komite DPS terkait peninjauan Komite DPS. Adapun kesepakatannya, yaitu: pembaharuan tujuan dari komite DPS, pemindahan fungsi Komite DPS ke komite lain yang terkait, seperti Komite Statistik dan Komite SNR, dan menutup Komite DPS.

Sekretariat melaporkan kondisi permodalan IRCo yang akan habis pada Februari 2025 sehingga diperlukan keputusan dari ITRC terhadap penambahan modal untuk IRCo, untuk dapat terus melanjutkan fungsinya sebagai sekretariat ITRC.

Beberapa kesepakatan terkait penambahan modal IRCo, sebagai berikut:

- i. Forum ITRC akan tetap berjalan.

- ii. IRCo akan menghitung kembali penggunaan anggaran yang tersisa, dan diharapkan dapat bertahan hingga akhir kepemimpinan CEO IRCo saat ini.
- iii. Akan dibentuk Task Force khusus untuk membahas keberlanjutan IRCo melalui pembentukan Sekretariat ITRC baru. IRCo akan menyusun kerangka kerja Task Force tersebut.
- iv. Rekomendasi Task Force akan dilaporkan pada pertemuan ITRC selanjutnya pada awal tahun 2025 di Indonesia.

Pertemuan menyepakati Rangkaian Pertemuan ITRC ke-40 akan dilakukan di Indonesia. Indonesia akan menyampaikan perkembangan lebih rinci terkait hal tersebut pada kesempatan pertama.

Hasil Pertemuan Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)

Rangkaian Pertemuan ANRPC Tahun 2024 telah diselenggarakan pada tanggal 8 – 11 Oktober 2024 di Singapura. Rangkaian pertemuan ini terdiri dari Pertemuan ke-17 Komite Urusan Industri (IMC), Pertemuan ke-56 Komite Eksekutif ANRPC (EXCO), dan Pertemuan ke-46 ANRPC Assembly.

Pertemuan Komite Informasi dan Statistik menyepakati untuk melakukan pertemuan Working Group of Expert in Supply and Demand Analysis pada minggu pertama Bulan Desember 2024 di Kantor Sekretariat ANRPC. Pertemuan diharapkan dapat dilaksanakan secara fisik ataupun hybrid. Beberapa agenda penting yang akan dibahas dalam pertemuan, antara lain: i. Reviu data untuk “Handbook on NR Statistics”, yang rencana dipublikasikan pada tahun 2025. ii. Penggunaan metode analisis dan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi karet alam, dalam rangka analisa proyeksi produksi-konsumsi karet alam. iii. Pemanfaatan data terkait karet alam dari negara produsen karet alam non-ANRPC.

Pertemuan menyepakati untuk menyusun Panduan Sustainable Natural Rubber (SNR) menggunakan pendekatan penyesuaian SNR Model yang telah ada dengan panduan dari Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR).

Pertemuan juga menyepakati untuk melaksanakan pilot project untuk program ketertelusuran karet alam baik melalui skema sertifikasi sebagaimana yang ditawarkan dengan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) maupun tanpa sertifikasi melalui GPSNR. Pertemuan sepakat agar Sekretariat melakukan kompilasi terkait skema yang akan dipilih negara anggota.

Pertemuan menyambut baik rencana pengembangan basis data dan meminta Sekretariat menyusun proposal rinci rencana pengembangan basis data dengan dilengkapi penawaran dari beberapa pihak ketiga sebagai pembanding. Pertemuan sepakat terkait anggaran akan dipertimbangkan pada Pertemuan Komite Eksekutif ANRPC pada tahun 2025.

Sekretariat menyampaikan laporan terkait hasil rekomendasi Pertemuan Task Force Kaukus ANRPC tanggal 5 – 7 Juni 2024 di Bangkok yang menyepakati

untuk mengeluarkan Joint Communique (JC) terkait Livelihood Rubber Price. Disepakati dalam LRP batas harga minimum dan maksimum ekspor karet berada pada level USD2,2 per kg – USD 3,5 per kg untuk TSR20. Harga LRP merupakan harga di Tingkat Freight on Board (FoB). Untuk jenis karet lainnya akan merujuk pada harga pasar. LRP rencananya akan diimplementasikan pada 1 Januari 2025.

Pertemuan mencatat harga karet saat ini sedang mengalami kenaikan dan hampir mencapai harga minimum LRP. Pengumuman pelaksanaan LRP saat melalui Joint Communique saat ini dianggap tidak akan memberikan reaksi pada pasar. Meskipun sebagai besar negara anggota mendukung pelaksanaan LRP, kondisi belum tersedianya mekanisme terkait monitoring dan evaluasi LRP menjadi salah satu pertimbangan untuk diumumkannya LRP melalui JC.

Pertemuan menyepakati agar Task Force menyusun metode pelaporan dan evaluasi pelaksanaan LRP. Delegasi Thailand juga menyampaikan upayanya untuk mengajak Pantai Gading untuk melaksanakan LRP. Task Force akan memulai diskusi setelah laporan Thailand untuk perkembangan keikutsertaan Pantai Gading.

Berdasarkan besaran produksi Indonesia, maka kontribusi Indonesia pada ANRPC tahun 2025 menjadi RM224.739 (USD46.821) atau naik sebesar 5,7% dari kontribusi Indonesia tahun 2024. Berdasarkan rotasi, Papua Nugini mendapatkan giliran menjadi Sekjen ANRPC periode 2026-2028. Sekjen ANRPC akan mengirimkan surat permintaan resmi kepada Papua Nugini untuk dapat mencalonkan Sekretaris Jenderal. Nominasi Sekretaris Jenderal akan disahkan pada Pertemuan Komite Eksekutif ke-57 tahun 2025.

Selanjutnya, Pertemuan menyepakati aturan rotasi Sekretaris Jenderal adalah Thailand, Indonesia, Vietnam, China, India, Malaysia, Kamboja, Myanmar, Filipina, Sri Lanka, Singapura, Bangladesh, dan Papua Nugini. Pertemuan menyepakati tuan rumah rangkaian Pertemuan Tahunan ANRPC tahun 2025 adalah Malaysia dan tahun 2026 adalah Thailand, sedangkan untuk Tahun 2027 akan dibahas kemudian.

Hasil Pertemuan International Coffee Organization (ICO)

Indonesia merupakan salah satu negara dari kawasan Asia, bersama dengan India, yang telah menjadi bagian dari ICO sejak International Coffee Agreement (ICA) 1962 dengan status *acceptance*. ICO selanjutnya berjalan dengan berlandaskan kepada ICA 1968, ICA 1976, ICA 1983, ICA 1994, ICA 2001, dan ICA 2007. Sebagai informasi, ICA 2007 akan digantikan dengan ICA 2022, yang penyusunannya dilatarbelakangi oleh pandangan negara anggota ICO bahwa fungsi ICO saat ini tidak lagi relevan dengan situasi aktual sektor kopi global. Penyusunan ICA 2022 juga bertujuan untuk mendukung reformasi organisasi dan mengakomodir isu-isu baru di sektor kopi, khususnya terkait agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Pada perkembangannya, ICA 2022 kemudian

disepakati pada Pertemuan Dewan ICO Sesi Khusus ke-133 tanggal 8 – 9 Juni 2022. Sehubungan dengan hal ini, Indonesia telah melakukan penandatanganan ICA 2022 pada tanggal 8 Maret 2023 di kantor Sekretariat ICO di London, Inggris. Adapun saat ini Indonesia sedang menempuh proses ratifikasi atas ICA 2022 yang diharapkan dapat selesai sebelum tanggal 31 Juli 2025.

o **Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-137.**

Pada tanggal 19 Maret 2024 telah diselenggarakan Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-137 secara virtual yang dipimpin oleh Dr. Enselme Gouthon dari Togo, selaku Ketua Dewan ICO periode tahun kopi 2023/24. Beberapa isu yang dibahas pada pertemuan adalah:

- **Redistribusi Hak Suara Tahun Kopi 2023/24.** Indonesia memiliki 61 hak suara pada tahun kopi 2023/24, yang menjadikan Indonesia sebagai pemegang *share* hak suara terbesar keempat setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia.
- **Keanggotaan ICA 2022.** Direktur Eksekutif (DE) ICO melaporkan 15 negara yang telah melakukan penandatanganan ICA 2022, termasuk Arab Saudi yang merupakan negara anggota baru melalui penandatanganan tanggal 20 Februari 2024. Selain itu, turut diinformasikan 3 negara yang telah menyelesaikan prosedur keanggotaan ICA 2022, yaitu Jepang, Nikaragua, dan Swiss, yang mewakili 15,2 persen negara pengimpor dan 2,3 persen negara pengekspor. Indonesia menginformasikan bahwa proses ratifikasi atas ICA 2022 di Indonesia memerlukan waktu sehubungan dengan pemilu yang baru selesai dilaksanakan.
- **Situasi Keuangan Organisasi.** Ketua Komite Finance and Administration (FA), yang dijabat Mr. Zoltan Agai dari Uni Eropa, menginformasikan saldo kas organisasi per Maret 2024 sebesar £2.807.000. Apabila Sekretariat ICO tidak menerima pembayaran kontribusi dari negara anggota, saldo kas ini dianggap cukup untuk membiayai kegiatan operasional organisasi hingga akhir tahun kopi 2023/24 (September 2024) serta biaya likuidasi sebesar £1.009.000.
- **Draf Anggaran Tahun 2024/25.** Ketua Komite FA menyampaikan kontribusi per hak suara tahun 2024/25 sebesar £1.300, dengan total kontribusi negara anggota sebesar £2.600.000 yang tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2018/19 dan 2019/20, maka draf anggaran 2024/25 menunjukkan penurunan *real terms* sebesar 17 persen. Indonesia menggarisbawahi prioritas utama ICO untuk implementasi program kegiatan yang bermanfaat bagi negara anggota. Dengan menyoroti alokasi biaya pegawai sebesar 71 persen, Indonesia meminta Sekretariat ICO untuk melakukan restrukturisasi anggaran sehingga negara anggota memperoleh

pemanfaatan maksimal dari kontribusi yang dibayarkan ke ICO. Pertemuan sepakat untuk membahas kembali draf anggaran tahun 2024/25 pada Pertemuan Komite FA.

- Lokasi Kantor Sekretariat ICO. Sehubungan dengan akan berakhirnya kontrak sewa kantor Sekretariat ICO yang saat ini berlokasi di 222 Gray's Inn Road pada bulan Juni 2025, Ketua Komite FA menginformasikan beberapa opsi perpanjangan sewa pada lokasi kantor saat ini. Mempertimbangkan periode transisi dari ICA 2007 ke ICA 2022, DE ICO mengusulkan kontrak sewa jangka pendek, untuk kemudian pindah ke lokasi lain yang biaya sewanya lebih rendah sebagai opsi jangka panjang ke depannya. Terkait kontrak sewa jangka pendek, DE ICO menyarankan perpanjangan kontrak sewa pada lokasi kantor saat ini selama 4 tahun dengan *break clause* 2 tahun.
- Italia menyampaikan komunikasi tertulis yang dikirimkannya kepada Sekretariat ICO terkait pernyataan minat untuk menjadi tuan rumah kantor Sekretariat ICO. Sebagai tindak lanjut atas penyampaian minat ini, Italia akan mulai berdiskusi dengan Sekretariat ICO. Swiss turut menyampaikan minatnya untuk menjadi tuan rumah. Pertemuan kemudian sepakat dengan usul yang diajukan DE ICO untuk memperpanjang kontrak sewa kantor pada lokasi saat ini selama 4 tahun dengan *break clause* 2 tahun sembari menunggu berlakunya ICA 2022 untuk membahas opsi jangka panjang ke depannya.
- Susunan Office Holders dan Komite. Rangkaian Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-136 tanggal 25 – 29 September 2023 di Bengaluru, India telah menyepakati keanggotaan Komite FA dan Joint Committee, dimana Indonesia telah tergabung sebagai anggota pada kedua komite tersebut.

o **Rangkaian Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-138.**

Pada tanggal 9 – 12 September 2024 telah diselenggarakan Rangkaian Pertemuan Dewan ICO Sesi ke-138 di London, Inggris yang dipimpin oleh Dr. Enselme Gouthon dari Togo, selaku Ketua Dewan ICO periode tahun kopi 2023/24. Beberapa isu yang dibahas pada pertemuan adalah:

- Keanggotaan International Coffee Agreement (ICA) 2022. Hingga September 2024, sebanyak 20 negara telah menandatangani ICA 2022, dan 5 negara telah menyelesaikan proses ratifikasi di tingkat nasional. Kelima negara tersebut adalah Jepang, Swiss, Nikaragua, Arab Saudi, dan Meksiko yang mewakili 15,2 persen negara pengimpor dan 4,8 persen negara pengekspor. Jangka waktu penandatanganan ICA 2022 ditetapkan sampai dengan 30 April 2025 dan jangka waktu deposit instrumen sampai dengan 31 Juli

2025. Terkait proses ratifikasi ICA 2022, saat ini Indonesia sedang menempuh proses harmonisasi.

- Keuangan dan Administrasi. Usulan kontribusi per hak suara tahun 2024/25 sebesar £1.300, dengan total kontribusi negara anggota sebesar £2.600.000, yang tidak ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan draf anggaran tahun 2024/25 tidak mengakibatkan kenaikan kontribusi negara anggota, pada prinsipnya Indonesia dapat menerima usulan draf anggaran tahun 2024/25 yang diajukan oleh Sekretariat ICO.
- Relokasi Kantor Sekretariat ICO. Duta Besar Swiss untuk Inggris telah mengeluarkan pernyataan tertulis yang menyatakan minat negaranya untuk menjadi tuan rumah bagi kantor Sekretariat ICO, yang secara khusus akan berlokasi di Jenewa. Pemerintah Swiss saat ini sedang menyusun proposal konkret atas minatnya untuk menjadi tuan rumah kantor Sekretariat ICO untuk diajukan kepada organisasi. Sebagai informasi, Pemerintah Swiss menawarkan dukungan keuangan untuk sebagian biaya sewa kantor Sekretariat ICO di Jenewa dan ruang kantor untuk setiap pegawai.
- Italia juga telah menyampaikan komunikasi tertulis kepada Sekretariat ICO yang menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah kantor Sekretariat ICO.
- Office Holders dan Komite Periode Tahun 2024/25. Pertemuan menetapkan Mr. Tom Fabozzi dari Uni Eropa sebagai Ketua Dewan ICO, sedangkan posisi Wakil Ketua Dewan ICO dijabat Mr. Mick Wheeler dari Papua Nugini. Pertemuan juga menyetujui nominasi anggota Joint Committee yang beroperasi selama masa transisi antara ICA 2007 dan ICA 2022. Indonesia, bersama dengan India, Nepal, dan Vietnam merupakan anggota Joint Committee mewakili Kawasan Asia. Lebih lanjut, pertemuan secara aklamasi menetapkan Mr. Zoltan Agai dari Uni Eropa) dan Bapak Reza Pahlevi Chairul dari Indonesia sebagai Ketua dan Wakil Ketua Joint Committee.
- Selain itu, pertemuan menetapkan Mr. Aly Touré dari Pantai Gading dan Mr. Zoltan Agai dari Uni Eropa sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite FA, dimana Indonesia merupakan salah satu anggota komite FA. Adapun nominasi Gabungan Ekspor Kopi Indonesia (GAEKI) sebagai representatif sektor swasta Indonesia dalam Private Sector Consultative Board (PSCB) juga disetujui.

5. Kerja Sama G20, WEF dan G7

G20 TRADE AND INVESTMENT WORKING GROUP (TIWG)

Pembahasan sektor perdagangan di G20 dilakukan melalui G20 *Trade and Investment Working Group* (TIWG). Perundingan G20 TIWG tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Presidensi Brazil, dan pada tahun 2025 ini Afrika Selatan menjadi Presidensi G20 tahun.

Kementerian Perdagangan sebagai salah satu instansi penjurur (*focal point*) Indonesia untuk G20 TIWG perlu terus berperan aktif dalam perundingan di sektor perdagangan dengan negara anggota G20, guna memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional Indonesia dan negara berkembang, serta menciptakan koherensi di tingkat multilateral/plurilateral.



Gambar 16. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Memimpin Delegasi RI pada Pertemuan G20 TIWG Brazil 2024



Gambar 17. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Mewakili Menteri Perdagangan pada Pertemuan G20 Trade and Investment Ministers Meeting Brazil 2024

G7 TRADE MINISTERS MEETING (TMM)

Indonesia diundang untuk pertama kalinya dalam Pertemuan G7 TMM sebagai negara mitra dimana Indonesia menghadiri 2 (dua) sesi utama yaitu: i) *Outreach Session*, dengan agenda Peningkatan Ketahanan Rantai Pasok dan Kemitraan antara Sektor Publik dan Swasta; dan ii) *Working Dinner*, membahas topik Perdagangan Berkelanjutan, Kelestarian Lingkungan, Aspek Pembangunan, Digital, dan isu prioritas Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 WTO.

Pertemuan dipimpin oleh Yoko Kamikawa, Menteri Luar Negeri Jepang dan Yasutoshi Nishimura, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, Jepang. Pertemuan dihadiri oleh seluruh perwakilan negara anggota G7, negara mitra yaitu Indonesia, Australia, India, Chile, Kenya serta Organisasi Internasional (WTO, OECD, dan ERIA). Jepang juga mengundang sektor bisnis terkemuka dunia seperti Kaidanren, Canpotex, Siemens Energy, Suzuki, JOHMEC, Rio Tinto dan Coherent.

Dalam *Outreach Sesssion*, Seluruh negara G7 dan mitra termasuk Indonesia sepakat bahwa rantai pasok yang lebih terdiversifikasi merupakan jalan untuk ketahanan rantai pasok global. Keterlibatan sektor swasta melalui inovasi dan kolaborasi dengan sektor publik dipandang dapat mendukung upaya tersebut. Indonesia menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi dalam menghasilkan nilai tambah dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sementara itu, sektor bisnis juga menyampaikan rekomendasi pentingnya kolaborasi dan kerja sama antar pemerintah dan swasta dalam memperkuat rantai pasok global.

Dalam *Working Dinner*, negara anggota G7 menyampaikan Penguatan rantai pasok global khususnya pada *critical raw material* perlu menjadi fokus utama untuk mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik dalam upaya transisi menuju energi bersih terbarukan.

Indonesia menyampaikan bahwa seluruh negara perlu memastikan kebijakan terkait kelestarian lingkungan tidak menjadi hambatan terselubung dalam perdagangan serta mendorong berfungsinya kembali sistem penyelesaian sengketa sebagai prioritas utama agenda reformasi WTO serta penyelesaian perundingan yang telah dimandatkan pada KTM WTO sebelumnya yang mencakup solusi permanen *public stockholding*, pengecualian hak kekayaan intelektual untuk diagnosis dan terapi COVID-19, perjanjian subsidi perikanan tahap dua serta perpanjangan moratorium bea masuk transmisi elektronik.



Gambar 18. Menteri Perdagangan RI Didampingi Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Menghadiri Outreach Session G7 Trade Ministers Meeting 2024

6. Kegiatan Kerja Sama di Forum D8, OKI, IORA, CPTPP

D-8

The 7th Session Supervisory Committee (SC) pada tanggal 4 Maret 2024 di Dhaka, Bangladesh

Hasil pertemuan SC diantaranya: i) negara anggota yang telah menyelesaikan proses domestik (Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Türkiye) agar segera memulai operasionalisasi PTA; ii) perluasan PTA akan dibahas setelah semua anggota D-8 memulai implementasi PTA; iii) kerja sama dalam rangka pengembangan kapasitas; dan iv) mengadopsi *Protocol on Dispute Settlement Mechanism (DSM)* dan *Paper on D-8 Trade Facilitation Strategy (TFS)*.

The 3rd Trade Ministers Council (TMC) of the D-8, Tanggal 5 Maret 2024 di Dhaka, Bangladesh

DELRI menyampaikan komitmen Indonesia terhadap D-8 PTA dan mengajak seluruh negara anggota untuk mengoptimalkan potensi perdagangan melalui pemanfaatan dan implementasi PTA.

TMC ke-3 mengadopsi "*Dhaka Declaration on D-8 Trade Cooperation*" yang mencakup beberapa poin diantaranya mendorong implementasi D-8 PTA untuk meningkatkan perdagangan intra D-8 agar mencapai target 10%

dari total perdagangan D-8 dengan dunia, sebagaimana tertuang dalam *D-8 Decennial Roadmap 2020-2030*.

Informal Meeting Trade Ministers Council (TMC) D-8, Tanggal 11 Juni 2024 di Istanbul, Turki

Indonesia telah memulai implementasi D-8 PTA sejak 1 Juni 2024 dan mengusulkan agar D-8 PTA dapat diperluas menjadi lebih komprehensif, baik dalam FTA atau CEPA, untuk menghadapi ekonomi dunia yang dinamis serta meningkatkan daya saing D-8.

Indonesia, Turki, dan Mesir siap menjadi tuan rumah *workshop* pengembangan kapasitas dalam rangka mendukung implementasi D-8 PTA. Negara anggota juga mendukung rencana Sekretariat dalam menyiapkan sistem barter dan sistem *e-commerce* intra D-8.

Indonesia, Turki, Iran, dan Bangladesh melakukan penandatanganan Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa (DSM) D-8 PTA, dimana protokol dimaksud sebelumnya telah diadopsi pada pertemuan TMC ke-3 tanggal 5 Maret 2024 di Dhaka, Bangladesh.

OKI

Trade Working Group (TWG) ke-22, Tanggal 6 Mei 2024

Pertemuan COMCEC *Trade Working Group* (TWG) ke-22 telah diselenggarakan secara virtual tanggal 6 Mei 2024 dan mengusung tema “*Improving Quality Infrastructure in the OIC Member Countries*”. Pertemuan diikuti oleh perwakilan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta Lembaga-lembaga khusus dibawah OKI, seperti COMCEC *Coordination Office* (CCO), *Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC), dan *Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries* (SESRIC). Agenda utama pertemuan adalah untuk membahas rencana kajian dan kerangka kerja CCO dalam rangka mengembangkan *National Quality Infrastructure* (NQI).

Pertemuan Tingkat Menteri ke-3 TNC TPS-OIC, Tanggal 11 Juni 2024 di Istanbul, Turki

Pertemuan mengadopsi *Istanbul Ministerial Declaration* yang mencakup beberapa hal seperti: i) mengecam kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina; ii) mendorong partisipasi dalam TPS-OIC; iii) mengakui peran penting fasilitasi perdagangan, investasi dan perdagangan jasa; dan iv) mencatat adanya pembahasan awal tentang Strategi Perundingan dan Kemungkinan Perluasan TPS-OIC.

Indonesia menegaskan dukungan terhadap rakyat Palestina dan siap memberikan bantuan medis hingga mengirimkan pasukan penjaga perdamaian apabila diperlukan. Terkait kerja sama perdagangan, Indonesia mengusulkan agar TPS-OIC diperluas menjadi lebih

komprehensif dan proses perundingan dilakukan secara bertahap (*incremental*).

Trade Working Group (TWG) ke-23, Tanggal 19-20 September 2024

Agenda utama pertemuan adalah memaparkan hasil kajian CCO dalam rangka mengembangkan *National Quality Infrastructure* (NQI). Sebuah panduan kebijakan telah disiapkan untuk mendukung pengembangan QI di Negara Anggota OKI, untuk berbagi informasi tentang cara merumuskan strategi yang efektif dengan memanfaatkan lembaga OKI yang relevan dan kerja sama internasional, dan untuk memberikan langkah-langkah terperinci dan konkret yang mungkin berguna para pembuat kebijakan untuk dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dalam negeri.

The 40th Ministerial Session of the COMCEC, Tanggal 1–6 November 2024

Pertemuan telah mengadopsi *Resolution of the 40th COMCEC* dengan beberapa poin utama antara lain: i) upaya bersama tekan Israel agar hentikan serangan ke Palestina; ii) seruan kepada negara anggota OKI untuk bebaskan bea dan pajak atas barang-barang dari Palestina; iii) dorong pemanfaatan fasilitas dan mekanisme COMCEC, terutama *COMCEC Working Group*, *COMCEC Project Funding*, dan *COMCEC Al-Quds Program*.

IORA

The 23rd Working Group on Trade and Investment of the Indian Ocean Rim Association (23rd WGTI IORA), Tanggal 27 November 2024

Pertemuan WGTI ke-21 IORA telah dilaksanakan secara virtual pada tanggal 27 November 2024 dan dipimpin oleh Mozambik selaku *Chair* dan dimoderatori oleh *Director for Trade and Investment Facilitation, Sekretariat IORA*.

Sesi *Working Session* membahas update matriks *2nd Work Plan of the WGTI*. Indonesia merupakan penanggungjawab untuk pengembangan *IORA Trade Repository* (IORA-TR) sebagaimana tertuang dalam *working activity* butir 5.3 (*Establish online feedback systems for private sector to register NTB complaints*) dan butir 9.5 (*Establish mechanism for Member States to regularly submit updated information*). Indonesia perlu segera memfinalisasi pengembangan IORA-TR mengingat hal ini merupakan bentuk kontribusi Indonesia serta mempertimbangkan *time-frame work activity* yang akan berakhir pada 2026.

CPTPP

Pertemuan Awal dengan *Commission Chair* CPTPP 2024 dalam rangka Persiapan Akses Indonesia dalam CPTPP, Tanggal 30 Desember 2024

Terdapat 3 (tiga) prinsip utama dalam proses akses CPTPP yang dikenal dengan "*Auckland Principles*", yaitu: calon negara anggota harus siap memenuhi standar tinggi CPTPP, calon negara anggota bersedia menunjukkan keinginan untuk memenuhi komitmen perjanjian, dan pengambilan keputusan dilakukan secara konsensus oleh semua negara anggota CPTPP.

Indonesia diminta untuk melengkapi "*Questionnaire for Aspirant Economies*" untuk mengevaluasi kesiapan, mengukur kapasitas dan kesiapan calon negara anggota dalam memenuhi seluruh standar tinggi CPTPP. Terkait hal ini, tim teknis Kanada akan membantu Indonesia dalam mengakses kuesioner dan *CPTPP Online System*.

Berdasarkan hasil diskusi awal Kanada dengan *Senior Officials* CPTPP, lebih dari 6 (enam) negara anggota mendukung rencana akses Indonesia ke dalam CPTPP. Terkait akses pasar, calon negara anggota akan menyampaikan *offer-list* dalam *plenary meeting* CPTPP. Apabila *offer-list* secara umum dapat diterima oleh negara anggota, proses selanjutnya adalah perundingan bilateral dengan setiap negara anggota CPTPP. Kesepakatan akses pasar dalam setiap perundingan bilateral kemudian akan digabungkan dengan *offer-list* yang telah disepakati dalam *plenary meeting* untuk membentuk *final offer-list*.

7. Kegiatan Kerja Sama Organisasi PBB (UNCTAD, UNESCAP) dan Organisasi Internasional Lainnya

UNCTAD

UNCTAD memiliki agenda pertemuan utama, antara lain (agenda 2024)

1. **UNCTAD Conference**; Pertemuan tingkat Menteri negara anggota UNCTAD setiap 4 tahun yang menyepakati arah dan visi UNCTAD untuk jangka waktu 4 tahun ke depan. (PTM terakhir diselenggarakan pada 2021 di Barbados. PTM selanjutnya akan diadakan pada tahun 2024)
2. **Trade and Development Board**; pertemuan yang diselenggarakan minimal satu tahun sekali untuk mendiskusikan rencana program dan anggaran UNCTAD sebagai implementasi dari Conference. Indonesia dalam pertemuan ini diwakili oleh PTRI Jenewa.
3. **Working Party**; Membahas aspek teknis implementasi program dan anggaran. Bertemu 3 – 5 kali dalam setahun.

4. **Comissions**; pertemuan badan khusus UNCTAD atau UN (ECOSOC) untuk membahas isu-isu tertentu untuk jangka waktu tertentu. Commission yang masih aktif pada 2023 adalah Commission on Science and Technology for Development (CSTD)
5. **Intergovernment Group of Experts (IGE)**; pertemuan tingkat pakar yang membahas isu-isu khusus seperti IGE on E-Commerce and Digital Economy, IGE on Consumer Protection Law and Policy, IGE on Competition Law and Policy, Multi-Year Expert Meeting on Trade, Services and Development dan lain-lain.
6. **Flagship Events**; pertemuan berskala besar yang mengundang *high-level speakers* dan berbagai pemangku kepentingan antara lain UNCTAD e-Week (sebelumnya bernama eCommerce Week), World Investment Forum dan Trade Policy Dialogue.

Delegasi Kementerian Perdagangan telah berpartisipasi pada Pertemuan Sesi ke- 7 Intergovernmental Group of Experts (IGE) on Consumer Protection Law and Policy, United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) di Jenewa, Swiss, 3-4 Juli 2023. Pertemuan membahas beberapa agenda terkait dengan perlindungan konsumen, antara lain perkembangan implementasi United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP).

Pada pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia aktif menyampaikan beberapa intervensi atas, antara lain:

- 1) Building trust in digital markets through enhanced consumer protection on online platforms, Indonesia telah memiliki pengaturan terkait hak-hak konsumen dalam transaksi melalui digital platform (e-commerce) serta telah menerbitkan UU tentang perlindungan data pribadi. Indonesia juga menyampaikan perkembangan pembangunan sistem *Online Dispute Resolution* (ODR).
- 2) Product safety, Perlunya memastikan keamanan produk yang diperdagangkan melalui digital platform, yang implementasinya melibatkan multi-stakeholders. Salah satu bentuk dapat mendorong peningkatan keamanan produk adalah dengan memberikan penghargaan keamanan produk diharapkan dapat mendorong kesadaran sektor swasta mendukung pentingnya keamanan produk. Saat ini juga sedang dikembangkan sistem informasi terkait keamanan produk non pangan.
- 3) Consumer protection and the transition to clean energy. Indonesia menyampaikan bahwa dalam rangka mencapai target net zero emission pada tahun 2060, Indonesia menjalankan beberapa strategi kebijakan, antara lain: retirement PLTU

secara bertahap, percepatan pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT) terutama pembangkit tenaga surya dan bayu, dan mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik dan kompor listrik. Pelaksanaan transisi energi perlu memperhatikan kepentingan konsumen, misalnya dalam hal ketersediaan dan keterjangkauan harga produk serta penyesuaian yang perlu dilakukan oleh konsumen.

- 4) *Digital Online Dispute Resolution for Consumer Protection (DODR)*, Indonesia sampaikan apresiasi atas kerja sama dengan UNCTAD dan sampaikan evaluasi terkait pentingnya asesmen dan validasi dalam pelaksanaan technical assistance UNCTAD yang menggunakan pendanaan eksternal.

UNESCAP

Agenda pertemuan UNESCAP

- ***Committee on Trade, Investment, Enterprise, and Business Innovation.***

Forum yang diadakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) dengan tujuan memperkuat kerja sama antara negara-negara anggota dalam hal perdagangan, investasi, dan inovasi bisnis dengan berfokus pada pengembangan strategi untuk meningkatkan perdagangan intra-regional dan menarik investasi asing. Isu-isu yang dibahas dalam forum seperti keberlanjutan investasi, transformasi digital dengan tujuan mengeksplorasi teknologi digital untuk dapat diadopsi meningkatkan efisiensi perdagangan dan investasi. Pertemuan diadakan 2 (dua) tahun sekali.

Delegasi Kementerian Perdagangan hadir pada The First Session of the committee on trade, investment, enterprise, and business innovation (Bangkok, 22 - 24 Februari 2023) pertemuan sebelumnya, beberapa poin penting yang dibahas mencakup upaya untuk meningkatkan kerja sama perdagangan nirkertas dan mendorong akses negara anggota ESCAP pada *Cross-Border Paperless Trade Agreement (CPTA)*. Hal ini dianggap krusial untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, forum ini memberi perhatian pada upaya untuk meningkatkan keterlibatan dengan dunia usaha melalui *Enterprise Singapore Business Network (ESBN)* dan Asia-Pacific Business Forum. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara sektor publik dan swasta, membuka peluang bagi investasi dan inovasi.

Dalam konteks pengembangan kapasitas, terdapat dorongan untuk memberikan dukungan teknis kepada negara-negara anggota guna memperkuat dampak dari investasi berdampak (*impact investing*) dan *Foreign Direct Investment (FDI)* sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi investasi

terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pertemuan ini juga menekankan pentingnya memanfaatkan dan memberikan edukasi spesifik bagi para negosiator perdagangan tentang kegunaan alat daring seperti *Trade Intelligence and Negotiation Adviser* (TINA). TINA, yang dapat diakses melalui TINA Trade, menawarkan sumber daya yang berguna untuk membantu negosiator mempersiapkan strategi perdagangan yang lebih efektif dengan data dan analisis yang mendalam.

Keikutsertaan menggarisbawahi komitmen Indonesia dalam memperkuat posisi dan kontribusinya di forum internasional dalam mendukung pengembangan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan di kawasan, serta siap mengambil peran aktif dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- **Paperless Trade Week UNESCAP**

Perwakilan Kementerian Perdagangan hadir secara online pada Paperless Trade Week 2024, sebuah acara penting yang mengumpulkan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk membahas inovasi perdagangan nirkertas. Kehadiran perwakilan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memajukan agenda perdagangan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta dalam mendukung transformasi digital di bidang perdagangan internasional.

Pertemuan berlangsung dengan format yang terintegrasi, termasuk pertemuan *back to back* antara *Standing Cross-Border Paperless Trade Agreement* (CPTA) dan *Fourth Session of the Paperless Trade Council of the CPTA*. Pertemuan-pertemuan ini menjadi platform strategis untuk mengevaluasi dan memperkuat kerjasama antarnegara dalam konteks penerapan perdagangan tanpa kertas.

Selama pertemuan, Diskusi di fokuskan pada tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara anggota dalam mengimplementasikan sistem perdagangan yang lebih digital dan efisien. Pertemuan juga membahas tentang kemajuan akses CPTA oleh negara anggota serta rencana ke depan yang relevan untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi antar negara. Partisipasi Indonesia dalam diskusi ini merupakan langkah penting dalam menjaga relevansi dan daya saing di pasar global, serta memastikan bahwa negara ini tidak tertinggal dalam adopsi teknologi yang dapat meningkatkan efektivitas perdagangan.

Melalui kehadiran online ini, Kementerian Perdagangan tidak hanya berperan aktif dalam memajukan implementasi *paperless trade*, tetapi juga menunjukkan dedikasinya dalam membangun jaringan dan sinergi dengan negara-negara lain. Diharapkan, hasil dari diskusi ini akan memberikan landasan yang kuat untuk menyusun rencana aksi yang dapat

diimplementasikan di Indonesia, serta mendorong akselerasi adopsi teknologi perdagangan tanpa kertas demi tercapainya efisiensi dan transparansi dalam sistem perdagangan yang lebih baik.

- Agenda Pertemuan Organisasi Internasional Lainnya
 - *Artificial Intelligence Action Summit (AIAS)*, Indonesia telah mengadakan Rapat Persiapan dan Rapat koordinasi lintas K/L pembahasan Draft Piagam Paris terkait tata kelola AI sepanjang tahun 2024
 - *Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF)*, Pertemuan pleno tahunan telah diselenggarakan di Indonesia bersama dengan PBB dengan agenda pembahasan inisiatif PBB di Indonesia sepanjang tahun 2024 dan inisiatif yang menjadi prioritas pada tahun 2025.
 - *UN Task Force on Seaweed (UNTFS)*, pertemuan internal antar K/L telah diselenggarakan sepanjang tahun 2024 sebagai persiapan untuk diluncurkan pada UN Ocean Conference Juni 2025 di Prancis.

Analisis Penyebab Keberhasilan Indikator Kinerja (IK)

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan memerlukan peran yang optimal dari masing-masing fungsi baik substansi maupun logistik. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kegiatan antara lain: kesesuaian topik atau isu strategis yang diangkat dengan peserta dan narasumber, komunikasi dan koordinasi yang baik secara internal penyelenggara maupun dengan K/L terkait, fasilitas dan pengelolaan logistik yang berkualitas baik, ketepatan alokasi waktu dan alur kegiatan, dan lain-lain.

Penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan lancar dengan didukung oleh perangkat logistik maupun sumber daya manusia yang memadai. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan diantaranya ketersediaan anggaran, sumber daya manusia yang memadai, relevansi topik atau isu strategis yang diangkat dengan kebutuhan konstituen domestik, koordinasi yang tepat antar Kementerian/Lembaga yang efektif dalam menentukan posisi nasional pada setiap kegiatan di forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional menjadi faktor penting dalam rangka percepatan penyelesaian perundingan.

Sasaran Program 2
Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia

Indikator Kinerja Program 2:

Presentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional

Cara Perhitungan:

$$D_t = \frac{\sum D_{jt}}{\sum E_{jt}} \times 100$$

D_t = Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan

D_{jt} = Posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan

E_{jt} = Posisi/kepentingan perdagangan Indonesia di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi tahun 2024 lebih tinggi, dimana pada tahun 2023 realisasi IK-5 sebesar 86,67 persen sedangkan tahun 2024 sebesar 95 persen.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan IK-5 antara lain:

- Efektifnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam memastikan substansi dalam deklarasi dan statement sesuai dengan kepentingan nasional;
- Konsistensi dan dukungan Kementerian/Lembaga dalam mengawal isu yang merupakan kepentingan nasional;
- Kesamaan pandangan dalam menyuarkan dan mendorong inisiatif yang dapat mengakomodasi kepentingan nasional.

Sementara itu, target yang telah ditetapkan pada tahun akhir Renstra sama dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 yaitu 80 persen, dengan realisasi 95 persen, menunjukkan pencapaian yang melampaui target yang telah ditetapkan sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja kedua (IK-2) merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan DPAKOl dalam memperjuangkan proposal Indonesia hingga menjadi bagian dalam sebuah kesepakatan atau deklarasi di beberapa forum internasional. Indikator ini diukur dengan menghitung besaran persentase proposal Indonesia yang diterima dan menjadi bagian dari kesepakatan atau deklarasi. Dalam hal ini kesepakatan atau deklarasi yang menjadi perjanjian kinerja DPAKOl adalah kesepakatan atau deklarasi yang diajukan.

Pada tahun 2024, Direktorat Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah berupaya untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia menjadi bagian dari kesepakatan di fora Antar Kawasan dan Organisasi Internasional lainnya dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

INDIKATOR	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)	80	85.7	107.1	80	95	118.75

Sumber: DPAKOI (2025)

Beberapa faktor yang berkontribusi pada pencapaian IK-2 diantaranya sebagai berikut:

- a. efektifnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam memastikan substansi dalam deklarasi dan statement sesuai dengan kepentingan nasional;
- b. konsistensi dan dukungan Kementerian/Lembaga dalam mengawal isu yang merupakan kepentingan nasional;
- c. kesamaan pandangan dalam menyuarakan dan mendorong inisiatif yang dapat mengakomodasi kepentingan nasional;

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Telah melakukan upaya untuk dapat memberikan kontribusi diterimanya proposal ataupun deklarasi/statement kepentingan Indonesia yang diajukan untuk menjadi bagian dari kesepakatan di fora Antar Kawasan dan Organisasi Internasional. Secara lebih detail kesepakatan atau deklarasi yang diperjuangkan tersebut antara lain:

APEC Ministers Responsible for Trade (MRT) 2024

Menteri Perdagangan memimpin Delegasi RI pada Pertemuan Menteri Perdagangan APEC ke—30 tanggal 17—18 Mei 2024 di Arequipa, Peru.

Dalam pertemuan tersebut, Mendag menekankan pentingnya kolaborasi antar Ekonomi APEC dalam menghasilkan kemajuan substansial pada *pending issues* di WTO seperti penyelesaian sengketa, subsidi perikanan dan isu-isu pertanian. Pada isu *e-commerce*, Indonesia menekankan agar isu moratorium harus sesuai dengan kesepakatan pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke—13 dan pentingnya fleksibilitas dan aspek pembangunan untuk mengurangi kesenjangan digital.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan kerja sama perlu menjadi fokus utama Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP). Diskusi untuk kemajuan FTAAP perlu dilakukan dengan pendekatan yang berimbang dan fleksibel.

Menteri Perdagangan berpandangan bahwa peningkatan konektivitas, inklusivitas terutama keterlibatan UMKM dan perempuan merupakan hal penting pada rantai pasok APEC. Digitalisasi juga merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan ketepatan waktu dalam rantai pasok.

Pertemuan Menteri Perdagangan APEC berhasil menyepakati *APEC Ministers Responsible for Trade Statement 2024*. Secara umum, Pernyataan memuat isu-isu perdagangan seperti dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral, integrasi ekonomi regional, fasilitasi dan inklusi perdagangan.

Selanjutnya, untuk pertama kalinya, APEC menyelenggarakan Pertemuan Bersama Menteri Bidang Perdagangan dan Menteri Bidang Perempuan dibawah Keketuaan APEC Peru. Pertemuan berhasil menyepakati *Joint Statement of Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade 2024*.

Rangkaian pertemuan lainnya yang turut dihadiri Mendag adalah Makan Siang Bersama dengan APEC Business Advisory Council (ABAC).

Di sela-sela Pertemuan APEC ke—30, Mendag juga melakukan 4 (empat) pertemuan bilateral dengan anggota Ekonomi APEC, yaitu Selandia Baru, Jepang, Kanada, dan Korea Selatan. Pertemuan bilateral menyampaikan usulan kerja sama Indonesia untuk impor sapi hidup dari Selandia Baru dan Kanada; peningkatan investasi mobil Listrik dari Jepang, Korea Selatan dan Kanda; serta permintaan dukungan akses Indonesia ke OECD dari Jepang dan Korea Selatan.

Selama tahun 2024, di forum APEC **sebanyak 9 dari total 10 usulan Indonesia telah diterima dalam statement tingkat Menteri dan Pemimpin Ekonomi APEC**. Beberapa usulan tersebut antara lain:

Tabel 9. Masukan Indonesia yang Diterima pada Statement of the Chair - Ministers Responsible for Trade Meeting 2024

Tabel 10. Keberterimaan Usulan Indonesia pada *Joint Ministerial Statement – Joint Meeting of Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade 2024*

Masukan Indonesia yang Diterima	
Joint Ministerial Statement – Joint Meeting of Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade 2024	
Judul	Indonesia berhasil mengusulkan perubahan judul <i>outcome document</i> dari kata 'Declaration' menjadi 'Joint Ministerial Statement' karena penggunaan kata 'Declaration' umumnya untuk kesepakatan di tingkat <i>Leaders</i> .
Akses Ekonomi untuk Perempuan	Indonesia berhasil menambahkan narasi mengenai pentingnya akses terhadap 'asset, skills' dalam pembahasan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Peningkatan Partisipasi Perempuan di Perdagangan Regional dan Global	<p><i>Global Value Chains</i></p> <p>Indonesia berhasil memasukkan narasi mengenai '<i>global value chains</i>' dalam konteks dukungan keterlibatan perempuan di bidang perdagangan.</p> <p><i>Sex-disaggregated Data</i></p> <p>Indonesia berhasil mengganti frasa 'sex-disaggregated trade related data' menjadi 'sex-disaggregated data' merujuk pada narasi di <i>the La Serena Roadmap for Women and Inclusive Growth (2019-2020), Part II</i>.</p> <p>UMKM</p> <p>Indonesia berhasil memasukkan narasi mengenai 'Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs)' pada konteks promosi program pengembangan kapasitas bagi perempuan.</p>
Target Waktu	Indonesia mengusulkan menghapus narasi ' <i>we look forward to meeting periodically</i> ' dalam konteks <i>review</i> kemajuan aksi-aksi kunci yang tercantum pada Pernyataan Bersama.

Tabel 11. Masukan Indonesia yang Tidak Diakomodir

Masukan Indonesia yang Tidak Diakomodir	
Joint Ministerial Statement - Ministers Responsible for Trade (MRT) Meeting 2024	
Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral	Subsidi Perikanan Indonesia mengusulkan untuk menambahkan frasa ' <i>and recognize appropriate and effective Special and Differential Treatment</i> ' pada pembahasan subsidi perikanan. Hal ini mengacu pada United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) 14.6. Usulan ini pada perkembangannya didukung oleh Viet Nam dan Thailand, namun pada akhirnya tidak diadopsi pada Pernyataan Bersama Menteri Perdagangan.
Joint Ministerial Statement – Joint Meeting of Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade 2024	
Peningkatan Partisipasi Perempuan di Perdagangan Regional dan Global	Indonesia mengusulkan menambahkan frasa ' <i>cooperation</i> ' dalam konteks pengumpulan, analisis, diseminasi, utilisasi <i>sex-disaggregated data</i> . Namun terminologi ini tetap digunakan.

Dokumen *statement* tingkat Menteri Perdagangan APEC 2024 dapat diakses melalui link berikut.

[Joint Ministerial Statement - Ministers Responsible for Trade \(MRT\) Meeting 2024](https://mddb.apec.org/Documents/2024/MM/MRT/24_mrt_jms.pdf)
https://mddb.apec.org/Documents/2024/MM/MRT/24_mrt_jms.pdf

[Joint Ministerial Statement – Joint Meeting of Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade 2024](https://mddb.apec.org/Documents/2024/MM/WMM-MRT/24_wmm-mrt_jms.pdf)
https://mddb.apec.org/Documents/2024/MM/WMM-MRT/24_wmm-mrt_jms.pdf

Presidensi G20 Brazil 2024

Terdapat 5 (lima) isu prioritas yang diangkat pada pertemuan G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) India yaitu: (1) Trade for Growth & Prosperity; (2) Trade & Resilient GVCs; (3) Integrating MSMEs in Global Trade; (4) Logistics for Trade; dan (5) WTO Reform.

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) telah menghadiri pertemuan TIWG 3 pada tanggal 10 - 12 Juli 2023 di Kevadia serta pertemuan TIWG 4 dan TIMM pada tanggal 21 – 25 Agustus 2023 di Jaipur, India. Pertemuan TIWG 3 membahas 5 (lima) usulan outcome documents India, sementara Pertemuan TIWG 4 fokus pada sesi drafting teks Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) Statement 2023.

Indonesia sebagai Troika menyampaikan keselarasan agenda prioritas yang diangkat oleh Presidensi G20 India dengan Ketetuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Indonesia mengharapkan Ketetuaan Indonesia di ASEAN serta Presidensi G20 India menjadi momentum penting kedua forum untuk saling bersinergi dan berkolaborasi mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta menghasilkan capaian-capaian konkret untuk kepentingan negara berkembang.

Sementara itu Pertemuan TIMM G20 diselenggarakan pada tanggal 24—25 Agustus 2023 di Jaipur India. Pada pertemuan tersebut Indonesia mengajak anggota G20 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengatasi kesenjangan. Indonesia juga menekankan agenda reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), terutama untuk mengembalikan fungsi Sistem Penyelesaian Sengketa WTO. Selain itu, Indonesia mendorong hasil konkret Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 WTO pada 2024 mendatang.

Indonesia menekankan bahwa setiap negara memiliki hak yang sama atas pembangunan dan pengolahan sumber daya untuk hasilkan nilai tambah.

G20 Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) 2024

Tabel 12. Keberterimaan Usulan Indonesia pada forum G20 Brasil 2024

Masukan Indonesia yang Diakomodir pada forum G20 Brasil 2024	
Trade and Investment Track	
Trade and Sustainable Development	<p>Isu perdagangan dan Pembangunan berkelanjutan</p> <p>Masukan Indonesia dalam para ini telah diakomodir, selaras dengan <i>Chairs Summary TIIMM Indonesia 2022</i>, pada isu “<i>The Role Of Multilateral Trading System To Strengthen The Achievement Of Sustainable Development Goals (SDGs)</i>”.</p>
	<p>Indonesia menyampaikan bahwa dokumen ini masih membutuhkan konsultasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait di dalam negeri, sebelum memberikan persetujuan penuh. Sehingga Indonesia mengusulkan dan berhasil mengubah frasa ‘<i>adopted</i>’ dan mengganti menjadi “<i>endorsed</i>”.</p>
Women in International Trade	<p>Peran perempuan dalam perdagangan internasional</p> <p>Indonesia mengusulkan term “<i>full, equal dan meaningful participation</i>” yang merupakan posisi Indonesia dan juga didorong dalam <i>Empower Working Group</i> sehingga dapat dipertimbangkan untuk diselaraskan dalam TIWG.</p>
	<p>Indonesia mengusulkan penambahan kata “<i>women focused trade</i>” dalam konteks Untuk lebih memfokuskan kebijakan perdagangan yang terkait dengan perempuan.</p>
	<p>Indonesia mengusulkan penambahan kalimat mengenai peningkatan kapasitas bagi Perempuan:</p> <p>“<i>We highlight the importance of assistance programs to strengthen the capacity of women and MSMEs to participate in international trade through facilitating access to knowledge, capital and diffusion of technology beyond the domestic economy.</i>”</p>

	<p>Indonesia mengusulkan untuk dapat dipertimbangkan penambahan frasa “as appropriate”. Hal ini mengacu penggunaan konsep “<i>monitoring mechanism</i>” dalam draf dikhawatirkan ditafsirkan sebagai mekanisme untuk menegakkan <i>value</i> atau konsep tertentu, dan juga untuk lebih memfokuskan kebijakan perdagangan yang terkait dengan perempuan.</p>
	<p>Selaras dengan pernyataan Indonesia, yang juga diangkat dalam teks <i>Empowerment Working Group</i> yang mendorong tidak hanya sekedar inklusi perempuan dalam perdagangan internasional namun juga “<i>empowerment</i>” dan “<i>meaningful participation</i>” bagi perempuan.</p>
WTO Reform and Strengthening of the Multilateral Trading System	<p>Reformasi WTO dan Penguatan Sistem Perdagangan Multilateral</p> <p>Usulan Indonesia untuk menambahkan kalimat terkait “<i>level-playing field and fair competition</i>”. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam <i>Chair’s Summary TIIMM</i> dan <i>Leaders’ Declaration</i> Indonesia 2022 dan India 2023.</p>
	<p>Indonesia mengusulkan untuk dapat dipertimbangkan pengintegrasian <i>wording</i> dari pertemuan sebelumnya, yaitu: <i>Chair’s Summary TIIWG</i> Presidensi Indonesia 2022 dan <i>Chair’s Summary TIWG</i> Presidensi India 2023.</p>
Annex to the G20 Leaders’ Declaration	<p>Refleksi kepentingan Indonesia pada pertemuan tingkat Menteri.</p>
Leaders’ Declaration	<p>Refleksi kepentingan perdagangan Indonesia pada deklarasi tingkat Presiden.</p>

Dokumen *statement* pertemuan Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) G20 Brasil 2024 dapat diakses melalui link berikut.

Trade and Investment Track –TIMM Meeting 2024

https://g20.utoronto.ca/2024/241024-TIWG_Annex_1_to_the_Leaders'_Declaration.pdf

Sasaran Program 3
Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional

Indikator Kinerja Program 3:

Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional

Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

INDIKATOR	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	83	84,2	109,1	85	89,75	105.6

Sumber: DPAKOI (2025)

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah melaksanakan kinerja III dengan meningkatnya Pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum antar kawasan dan organisasi internasional dengan melakukan Konsultasi Publik sebagai kegiatan untuk memperluas informasi sehingga tersampainya pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan-kebijakan perundingan antar kawasan dan organisasi internasional dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Keberhasilan tercapainya realisasi pada indikator kinerja 3 yang telah dilaksanakan Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi pada Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Focus Group Discussion (FGD) dan Kickoff Meeting Komite Bidang Trade Committee and the Working Party on Export Credits OECD, 9 September 2024

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan *Kickoff meeting* Komite Bidang *Trade Committee and the Working Party on Export Credits* (Komite Bidang Perdagangan) dibuka oleh Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional dan dihadiri oleh 158 perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) secara luring dan daring. Kegiatan FGD menghadirkan narasumber dari, yaitu: a) Sekretariat OECD antara lain: i) *Senior Legal Advisor, Directorate for Legal Affairs*; ii) *Senior Trade Policy Division, Trade Policy Division of the Trade and Agriculture Directorate*; dan iii) *Senior Policy Analyst, Export Credits and Competition Division of the Trade and Agriculture Directorate*; dan b) Wakil dari Keasdepan Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

FGD bertujuan untuk menyampaikan Rencana Kerja Komite Bidang Perdagangan untuk persiapan tahapan *self-assessment* dan penyusunan Initial Memorandum (IM). Dalam pertemuan FGD disampaikan bahwa untuk memenuhi target penyelesaian dokumen IM akan dilaksanakan serangkaian kegiatan rapat teknis untuk *self-assesment* kesesuaian kebijakan domestik Indonesia dengan instrumen hukum OECD



Gambar 19. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Kickoff Meeting Komite Bidang Trade Committee and the Working Party on Export Credits OECD, 9 September 2024

2. Focus Group Discussion (FGD) Ad-Interim Komite Bidang Perdagangan OECD, 7 November 2024

FGD Ad-Interim Komite Bidang Perdagangan OECD bertujuan untuk membahas perkembangan draf Initial Memorandum (IM) pada Komite Bidang Perdagangan untuk mendapat tanggapan lebih lanjut dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Wakil dari Kemenko Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon) selaku Ketua Sekretariat Tim Nasional Akses OECD menyampaikan bahwa Komite Bidang Perdagangan di bawah koordinasi Ditjen PPI dinilai memiliki metode kerja dan kemajuan substantif dalam penyusunan IM, serta menjadi *benchmark* bagi K/L Koordinator lainnya.

Sejumlah perkembangan penyusunan IM pada Komite Bidang Perdagangan, sebagai berikut:

- a) Telah disusun draf IM untuk 12 dokumen instrumen hukum di bawah Komite Bidang Perdagangan berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis, yang terdiri dari: 2 (dua) IM pada Trade Committee (TC); 4 (empat) IM pada Working Party on Export Credits and Credit Guarantees/Export Credit Group (ECG); dan 6 (enam) IM pada Committee on Small Medium Enterprises and Entrepreneurship (CSMEE)
- b) Sesuai identifikasi penilaian mandiri, Indonesia telah memiliki legislasi/kebijakan/praktik yang sesuai (*fully aligned*) dengan 2 (dua) instrumen hukum OECD pada TC, 2 (dua) pada ECG dan 2 (dua) pada CSMEE. Adapun terdapat 2 (dua) instrumen pada ECG yang selaras dengan penerapan di Indonesia, namun memerlukan tindakan lebih lanjut (*aligned but further actions required*), yaitu pada OECD/LEGAL/5005 mengenai *Arrangement* kredit ekspor yang didukung oleh pemerintah pada sektor tertentu (seperti *climate change*, *nuclear power plant*, dan lainnya), dan OECD/LEGAL/0442 tentang pemberian pinjaman asing kepada negara berpenghasilan rendah sesuai aturan IMF.
- c) Rencana kerja Komite Bidang Perdagangan: i) Permintaan tanggapan K/L pada 7 – 21 November 2024; ii) Kompilasi masukan dan finalisasi IM pada 21 November – 4 Desember 2024; iii) FGD Final Penyerahan IM Komite Bidang Perdagangan ke Sekretariat Tim Nasional Akses OECD pada 5 Desember 2024; dan iv) Persiapan review teknis pada Kuartal I 2025.



Gambar 20. Focus Group Discussion (FGD) Ad-Interim Komite Bidang Perdagangan OECD, 7 November 2024

3. Focus Group Discussion (FGD) Komite Bidang Perdagangan OECD, 29 November 2024

Focus Group Discussion (FGD) bertujuan untuk membahas penyempurnaan 12 (dua belas) draf dokumen Initial Memorandum (IM) pada Komite Bidang Perdagangan OECD dan tindak lanjut yang perlu diantisipasi Indonesia pada tahapan reviu teknis pasca penyerahan IM kepada Sekretariat OECD. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari 36 K/L yang hadir secara luring dan daring dan dibuka oleh Dirjen PPI yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah berkomitmen dalam proses penyusunan IM. Sekretariat OECD diharapkan dapat memfasilitasi diskusi dan pertukaran praktik terbaik untuk percepatan proses akses dan persiapan reviu teknis dari negara anggota OECD lainnya, khususnya dari negara anggota yang baru bergabung ke OECD.

Narasumber yang hadir pada kegiatan FGD, yaitu: a) Sekretariat OECD dari Tim *Directorate for Legal Affairs, Division of the Trade and Agriculture Directorate, dan Expert on the OECD Recommendation on Transparency in Free Trade Zones*; serta b) Wakil dari Keasdepan Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pembahasan FGD difokuskan pada penyempurnaan draf IM Komite Bidang Perdagangan, yang terdiri dari: i) dua (2) draf IM pada *Trade Committee*; ii) empat (4) draf IM pada *Working Party on Export Credits and*

Credit Guarantees; dan iii) enam (6) draf IM pada *Committee on SMEs and Entrepreneurship* (CSMEE). Sesuai hasil pratinjau awal oleh Sekretariat OECD, disampaikan bahwa 12 dokumen tersebut sudah cukup merepresentasikan hasil identifikasi kesesuaian Indonesia dengan instrumen hukum OECD.

Pasca-penyerahan keseluruhan dokumen IM secara formal kepada Sekretariat OECD, akan dilakukan reviu teknis yang diawali dengan tahapan pengumpulan informasi. Hal ini dilakukan melalui sirkulasi kuesioner dan misi pencarian fakta oleh Sekretariat OECD ke Indonesia.



Gambar 21. Focus Group Discussion (FGD) Komite Bidang Perdagangan OECD, 29 November 2024

4. Forum Diskusi “Kesiapan Perdagangan Nirkertas di Asia dan Pasifik dalam kerangka UNESCAP”

Forum diskusi diadakan secara hybrid pada tanggal 12 Desember dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan nasional mengenai perdagangan nirkertas, dan menjangkau masukan dari pemangku kepentingan terkait isu tersebut khususnya dalam kerangka UNESCAP. Dalam lingkup internasional, perdagangan nirkertas menjadi isu penting melalui *Trade Facilitation Agreement* (TFA) WTO, *ASEAN Single Window*, serta *Framework Agreement on Facilitation of Cross Border Paperless Trade in Asia and the Pacific* (CPTA) UNESCAP.

Kegiatan dihadiri oleh 63 peserta secara *hybrid* dengan menghadirkan 6 narasumber dari Kementerian/Lembaga, membahas: a). *Best Practices*

Penerapan Ekonomi Digital dan Perjanjian Perdagangan Digital dalam Organisasi Internasional lainnya (Kemenko Perekonomian); b). *The Benefits of Cross-Border Paperless Trade for Indonesia* (UNESCAP); c) Perkembangan isu Paperless Trade di WTO (DPOPD, Kemendag); d). Peluang dan Tantangan Implementasi Perdagangan Nirkertas Terhadap Kemudahan Transaksi Perdagangan (Bea dan Cukai, Kemenkeu); e). Kesiapan dan Tantangan UMKM Bali dalam Perdagangan Digital (KADIN Bali); dan f). Integrasi National Single Window dengan Standar Internasional Terkait Perdagangan Nirkertas (Lembaga Nasional Single Window/LNSW).

Poin – poin utama dalam forum diskusi adalah sebagai berikut:

- a. Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital yang memberi peluang terhadap adaptasi perdagangan nirkertas, terutama dalam perdagangan internasional.
- b. Berdasarkan data UN Global Survey Report on Digital and Sustainable Trade Facilitation 2023, tingkat implementasi perdagangan nirkertas Indonesia sudah mencapai 96,3%, namun implementasi perdagangan nirkertas lintas batas baru sebesar 61,11%, dengan tantangan utama pada pertukaran elektronik dokumen seperti custom declaration dan certificate of origin yang membutuhkan penyelarasan sistem lintas negara.
- c. CPTA UNESCAP mendorong efisiensi perdagangan melalui pertukaran data elektronik lintas batas. Bila menghendaki, Indonesia memiliki peluang besar untuk bergabung, karena tingkat implementasi yang tinggi. Selain itu fleksibilitas CPTA memungkinkan implementasi bertahap sesuai kesiapan domestik.
- d. Dengan akses CPTA, pertumbuhan ekspor Indonesia diproyeksikan meningkat hingga 15,06%. Terkait CPTA, UNESCAP akan memberikan pelatihan, berbagi pengetahuan, dan akses informasi untuk memperkuat infrastruktur perdagangan nirkertas lintas batas.
- e. Indonesia telah mengintegrasikan 15 Kementerian/Lembaga melalui Indonesia National Single Window (INSW) yang diatur dalam Perpres No. 44 Tahun 2018. Portal INSW memfasilitasi perdagangan nirkertas dengan menyediakan layanan terpusat untuk proses impor, ekspor, dan logistik, serta mendukung UMKM dengan informasi dan pelatihan. Portal ini juga membantu UMKM dengan informasi dan akses layanan perdagangan.
- f. Meskipun belum ada regulasi spesifik untuk perdagangan nirkertas, Indonesia memiliki beberapa dasar hukum seperti UU No. 1 Tahun 2024, PP No. 80 Tahun 2019, dan Permendag No. 31 Tahun 2023 yang mendukung unsur-unsur perdagangan nirkertas.

Secara umum, dari jalannya diskusi dapat diketahui tidak ada keberatan terhadap penerapan perdagangan nirkertas di Indonesia, namun perlu

disiapkan regulasi, infrastruktur, tata kelola data, peningkatan kapasitas dan koordinasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan mitra internasional.



Gambar 22. Forum Diskusi “Kesiapan Perdagangan Nirkertas di Asia dan Pasifik dalam kerangka UNESCAP”

5. Fokus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Sistem Preferensi Perdagangan Antar Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (TPS-OIC) dalam rangka Peningkatan Kinerja Perdagangan Indonesia

FGD diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan tujuan untuk menjangkau masukan, menganalisis peluang, tantangan, dan merumuskan rekomendasi dalam rangka mengoptimalkan partisipasi Indonesia pada OKI, khususnya melalui TPS-OIC, sebagai upaya peningkatan ekspor nasional.

Berdasarkan hasil analisis, TPS-OIC akan meningkatkan kesejahteraan (USD 262,27 juta), investasi (0,13%), ekspor (0,13%), impor (0,39%), dan GDP (0,017%). Neraca perdagangan Indonesia pada tahun pertama implementasi akan turun sebesar USD 63,1 juta, namun akan kembali

meningkat hingga tahun ke-4 sebesar USD 279,7 juta. penurunan tarif TPS-OIC akan membuka akses pasar lebih luas ke pasar OKI, dan berpotensi membuka kerja sama lainnya seperti bidang pendidikan, lingkungan, pertanian dan keamanan.

KNEKS mendukung percepatan proses ratifikasi TPS-OIC oleh Indonesia agar memudahkan ekspor produk ke negara OKI kedepannya. Hal ini juga sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025-2029.

Namun demikian, perlu adanya prinsip resiprokal dalam hal pemberian akses pasar, termasuk pengakuan sertifikasi Halal antar negara anggota OKI. Dengan demikian, TPS-OIC diharapkan dapat lebih dimanfaatkan pelaku usaha dan meningkatkan perdagangan produk Halal intra-OKI.

Berdasarkan pre-questionnaire dan post-questionnaire yang dibagikan kepada sebanyak kurang lebih 61 peserta, dinyatakan adanya peningkatan pemahaman mengenai diskusi yang dibahas setelah mengikuti kegiatan jaring masukan, sehingga terdapat peningkatan pemahaman sebesar 89%.



Gambar 23. Fokus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Sistem Preferensi Perdagangan Antar Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (TPS-OIC) dalam rangka Peningkatan Kinerja Perdagangan Indonesia

KINERJA ANGGARAN

Tabel 14. Realisasi Kinerja Anggaran DPAKOI 2024

Kode	Nama RO	Pagu	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
PBB.01	Rekomendasi Ratifikasi Kesepatan TPS OIC	229,709,000	229,380,052	328,948	99.86 %
PEC.001	Kerja Sama Akses Perdagangan dan Investasi Forum APEC	764,578,000	764,555,921	22,079	100.00 %
PEC.002	Kerja Sama Fasilitasi Perdagangan dan Investasi Forum APEC	624,126,000	624,097,926	28,074	100.00 %
PEC.003	Kerja Sama Antar Fora APEC	526,463,000	526,452,027	10,973	100.00 %
PEC.004	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Kopi Internasional	313,738,000	313,734,483	3,517	100.00 %
PEC.005	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Karet Internasional	392,968,000	392,944,034	23,966	99.99 %
PEC.006	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Lada Internasional	163,227,000	163,187,298	39,702	99.98 %
PEC.007	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Kelapa Internasional	154,469,000	154,251,837	217,163	99.86 %

Kode	Nama RO	Pagu	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
PEC.009	Kerja Sama Perdagangan dengan Negara Anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan Developing 8 (D-8)	662,407,000	662,379,696	27,304	100.00 %
PEC.010	Kerja Sama Perdagangan Organisasi Internasional Lainnya	393,399,000	392,384,056	1,014,944	99.74 %
PEC.012	Kerjasama Perdagangan dengan Negara Anggota G20 dan Organisasi PBB	1,205,279,000	1,205,257,910	21,090	100.00 %
PEC.013	Kerjasama Perdagangan Organisasi Komoditas Internasional Lainnya	29,637,000	29,631,394	5,606	99.98 %

Sumber: DPAKOI (2025)

Pagu awal tahun sebesar Rp. 6.500.000.000,-. Setelah penyesuaian/penghematan menjadi sebesar Rp 5,460,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5,458,256,634 atau 99,97%. Pos anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 1,743,366,- atau 0.03%. Penyebab masih adanya sisa anggaran karena terdapat selisih administrasi antara penggunaan anggaran dan pelaksanaannya.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

1. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional merupakan unit Eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perundingan dan kerja sama perdagangan pada forum antar kawasan dan organisasi internasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
2. Secara umum, kinerja organisasi DPAKOI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam perundingan dan kerja sama perdagangan pada forum antar kawasan dan organisasi internasional telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Terkait kinerja anggaran, realisasi anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.458.256.634 (lima miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau 99,97% dari total anggaran tahun 2024 sebesar Rp 5.460.000.000 (lima miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).

REKOMENDASI

1. Memperhatikan adanya efisiensi dan *refocussing* anggaran pada tahun 2024, diperlukan perencanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya secara cermat dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia agar target kinerja organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
2. Diperlukan pemantauan terhadap kinerja organisasi dan anggaran secara periodik guna memastikan kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja organisasi serta sebagai bahan masukan untuk pengembangan program dan kegiatan di tahun mendatang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja DPAKOI khususnya dalam mengawal setiap kepentingan Indonesia pada perundingan dan kerja sama perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1

**FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI
INTERNASIONAL
TAHUN 2020-2024**

N O	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional	1 Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional (Kegiatan)	$KS_t = \sum KS_{jt}$ KS _t = Jumlah Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional di tahun berjalan KS _{jt} = Kegiatan Kerja Sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional di tahun berjalan	Informasi dan dokumen kegiatan kerja sama bidang peningkatan akses pasar barang di Forum APEC dan Organisasi Internasional
2	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	1 Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)	$D_t = \frac{\sum D_{jt}}{\sum E_{jt}} \times 100$ D _t = Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan D _{jt} = Posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan	Informasi dan dokumen posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>internasional di tahun berjalan</p> <p>$E_{jt} =$ Posisi/kepentingan perdagangan Indonesia di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan</p>	
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum APEC dan Organisasi Internasional	1 Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (%)	$P_t = \frac{\sum P_{jt}}{\sum Q_{jt}} \times 100$ <p>$P_t =$ Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah di tahun berjalan</p> <p>$P_{jt} =$ Jumlah peserta kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah yang meningkat pemahamannya di tahun berjalan</p> <p>$Q_{jt} =$ Jumlah total kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen kuesioner pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan APEC dan organisasi internasional dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah

Lampiran 2. PERKIN DPAKOI 2024

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL**

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN DI FORUM ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar barang di negara mitra antar kawasan dan organisasi internasional	Jumlah kerja sama dalam rangka peningkatan akses pasar barang di forum antar kawasan dan organisasi internasional	Kerja sama	5
2	Tersedianya tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persentase	80
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional	Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan perdagangan antar kawasan dan organisasi internasional	Persentase	83